



# **DINSOSP3AKB**

## **RENSTRA**

### **Tahun 2025-2029**

**JALAN SUTAN SYAHRIR NOMOR 54 SANGGAU, KALIMANTAN  
BARAT 78512**

**TELEPON (0564) 21035 FAKSIMILE (0564) 21035  
LAMAM [WWW.DINSOSP3AKB.SANGGAU.GO.ID](http://WWW.DINSOSP3AKB.SANGGAU.GO.ID)  
POS-EL [DINSOSP3AKB@MAIL.SANGGAU.GO.ID](mailto:DINSOSP3AKB@MAIL.SANGGAU.GO.ID)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Pada prinsipnya Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2025-2029 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami Renstra ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau **“Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera”**.

Sanggau, 31 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sanggau



**VALENTINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19840402 200604 1 004

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                                                                                | <b>i</b>  |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                                                                    | <b>ii</b> |
| <br>                                                                                                                                       |           |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                                                                | 1         |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                                                                                | 3         |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....                                                                                                             | 5         |
| 1.4    Sistematika Penulisan .....                                                                                                         | 6         |
| <br>                                                                                                                                       |           |
| <b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU</b>     |           |
| 2.1    Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau                       | 10        |
| 2.1.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau       | 10        |
| 2.1.2    Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau                      | 20        |
| 2.1.3    Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau                 | 25        |
| 2.2    Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau           | 40        |
| 2.2.1    Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau                          | 51        |
| <br>                                                                                                                                       |           |
| <b>BAB III      Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau</b>                                            |           |
| 3.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau | 53        |
| 3.2    Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.                 | 53        |
| 3.3    Strategi jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.                            | 53        |
| 3.4    Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.                      | 58        |
| <br>                                                                                                                                       |           |
| <b>BAB IV      Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan</b>                                                             | <b>60</b> |

|                 |                      |            |
|-----------------|----------------------|------------|
| <b>BAB VIII</b> | <b>Bidang Urusan</b> |            |
|                 | <b>PENUTUP .....</b> | <b>156</b> |

## DAFTAR TABEL

|     |                                                                                                                                                                |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 | Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan Golongan Tahun 2025                | 21  |
| 2.2 | Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025      | 22  |
| 2.3 | Jumlah P3K Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025          | 22  |
| 2.4 | Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 | 23  |
| 2.7 | Analisis Strategi dengan Faktor SWOT                                                                                                                           | 36  |
| 2.8 | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah                                                                                 | 39  |
| 3.3 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                              | 55  |
| 3.4 | Penetapan Renstra DINSOSP3AKB                                                                                                                                  | 56  |
| 3.5 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan                                                                                                                        | 57  |
| 4.2 | Tabel Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau                                                                | 62  |
| 4.3 | Tabel Rancangan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan                                                                                                | 84  |
| 4.4 | Tabel Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah                                                                       | 141 |
| 4.5 | Tabel Indikator Kinerja Utama DINSOSP3AKB                                                                                                                      | 152 |
| 4.6 | Tabel Indikator Kinerja Kunci DINSOSP3AKB                                                                                                                      | 153 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

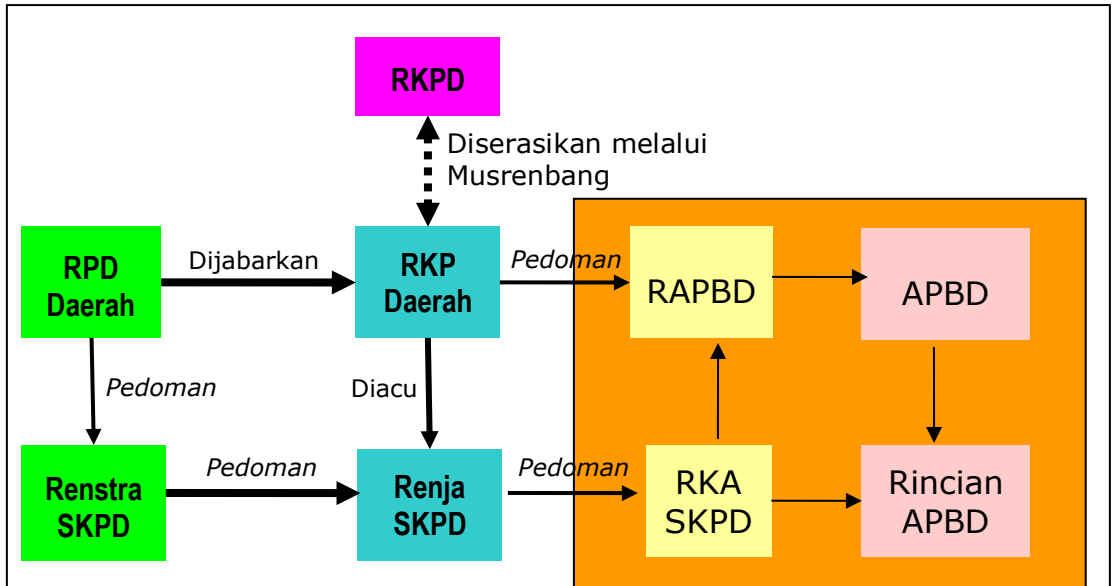
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai salah satu organisasi pemerintah dan perangkat daerah perlu terus menerus mengembangkan, meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat serta diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaan dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, diharapkan mampu mensinergikan harapan-harapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terwujudnya kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang semakin baik serta tercapainya sasaran dan target pembangunan yang diinginkan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 1 : Alur Pikir dalam Penyusunan Renstra

Alur Pikir integrasi Renstra Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :



RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan Renstra Dinsosp3akb Kab.Sanggu. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok RPJMD.

RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menjadi acuan untuk penyusunan RKA-DINSOSP3AKB (Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi

tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Adapun *critical point* dari susunan ini adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Untuk tahun 2025-2029 Renstra di susun selama lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DINSOSP3AKB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja DINSOSP3AKB.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam menyusun Renstra DINSOSP3AKB Kab. Sanggau mengacu pada peraturan per Undang-undangan yang berlaku yaitu :

1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD '45, serta 3) Landasan operasional :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 – 2029 adalah menjabarkan tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan tujuan dan sasaran Dinas Sosial P3AKB 2025-2029 dan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu dua tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat sebagai DinsosP3AKB.
3. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Dalam Penulisan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 terdiri dari :

##### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1 Maksud
  - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **Bab II      Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial P3AKB**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

- b. Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
  - c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
  - d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau
- a. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.
  - b. Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau**

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 3.3 Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029;

### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

- 4.1 Uraian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 4.2 Uraian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian SubKegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DINSOSP3AKB Tahun 2025-2029 melalui Indikator Utama (IKU) DINSOSP3AKB;
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

## **Bab V    Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut :

**A. Kepala Dinas**

**B. Sekretaris**

Sekretaris membawahi 3 ( tiga ) sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

**C. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**D. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**E. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**F. Bidang Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**G. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

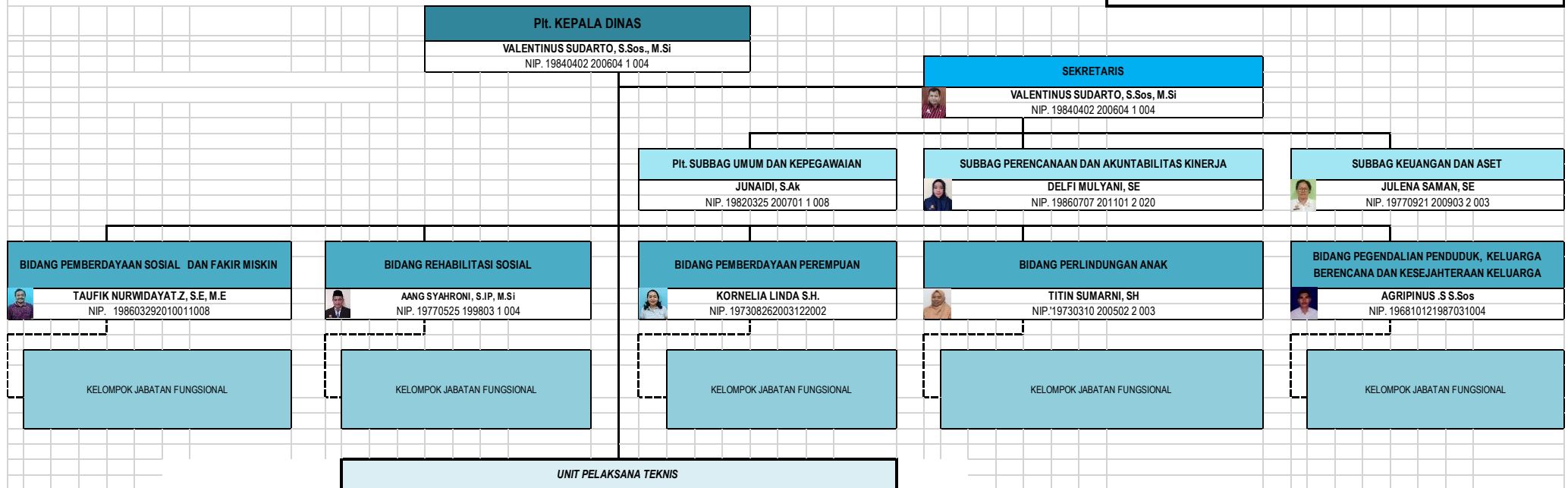
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**H. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SANGGAU**

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERATURAN BUPATI SANGGAU</b> |                                                                                                                                                               |
| <b>NOMOR</b>                    | : 79 TAHUN 2021                                                                                                                                               |
| <b>TANGGAL</b>                  | : 14 November 2021                                                                                                                                            |
| <b>TENTANG</b>                  | : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau |



Pt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SANGGAU,

**VALENTINUS SUDARTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina / IV a  
NIP. 19840402 200604 1 004

### **2.1.2 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

#### **1. Kepala Dinas**

Sesuai pasal 19 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas bantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas atas penyelenggaraan urusan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan administrasi dilingkup Dinas,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- g. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas,
- h. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas,

- i. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas,
- j. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas,
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- m. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- n. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- o. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan

dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,

- q. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- r. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **5. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas

- pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi

- dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi

- pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **8. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

### **2.1.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

#### **➤ Sumber Daya Manusia.**

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No 79 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah : 1 (satu) orang eselon IIb yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang eselon IIIa yaitu sekretaris, 5 (Lima) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 10 (Sepuluh) Jabatan Fungsional yang sudah di setarakan ) dan 2 Struktural.

Adapun total jumlah Sumber Daya Manusia atau Tenaga Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara keseluruhan adalah 43 Orang yang meliputi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil/Fungsional Umum sebanyak 28 orang, serta berstatus Non PNS atau Tenaga Kontrak berjumlah 15 Orang. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan, oleh sebab itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui data tersebut maka diketahui bahwa tenaga Pegawai Negeri Sipil struktural sebanyak 2 orang berstatus Jabaran fungsional Penyetaraan berjumlah 10 yang terdiri dari 9 orang Perempuan atau 90,90 % dan Laki-laki sebanyak 1 orang atau 9,09%. Jika dihitung berdasarkan tingkat golongan maka jumlahnya terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang atau 25 %, golongan III sebanyak 19 orang atau 67,85 % dan sisanya golongan II sebanyak 2 orang atau 7,14 %. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan Golongan Tahun 2025**

| NO | Jenis Kelamin | GOL I        | GOL II         | GOL III         | GOL IV         | Jumlah          |
|----|---------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1  | Laki-laki     | Orang        | 1 orang        | 5 orang         | 3 orang        | 9 orang         |
| 2  | Perempuan     | -            | 1 orang        | 14 orang        | 4 orang        | 19 orang        |
|    | <b>Total</b>  | <b>Orang</b> | <b>2 orang</b> | <b>19 orang</b> | <b>7 orang</b> | <b>28 orang</b> |

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Desember 2025 )

Adapun komposisi jumlah pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai dengan pendidikan akhir sarjana lebih banyak dibandingkan dengan yang

pendidikan di bawah Strata 1, dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Jika dihitung, adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana sebanyak 6 orang atau 21,42 %, Sarjana (Strata 1) sebanyak 16 orang atau 57,14 %, Diploma IV 1 Orang atau 3,57 %, Diploma III sebanyak 2 Orang atau 7,14 %, berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 14,28 %, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 3,57

% serta pendidikan SD sebanyak 0 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025**

| No | Jenis Kelamin | SD       | SMP      | SMA      | D1/II    | DIII/Akademi | DIV      | S1        | S2       | Jumlah    |
|----|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | Laki-laki     | 0        | 0        | 2        | -        | 0            | 0        | 4         | 3        | 9         |
| 2  | Perempuan     | -        | 1        | 1        | -        | 2            | 1        | 11        | 3        | 19        |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>-</b> | <b>2</b>     | <b>1</b> | <b>15</b> | <b>6</b> | <b>28</b> |

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Juni 2025)

**Tabel 2.3**  
**Jumlah P3K Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025**

| No. | Jenis Kelamin |    | Pendidikan |    |     | S2 |
|-----|---------------|----|------------|----|-----|----|
|     |               |    | SMA        | D3 | S.1 |    |
| 1   | Laki – Laki   | 7  | 5          | 0  | 1   | 1  |
| 2   | Perempuan     | 8  | 3          | 2  | 3   |    |
|     | Total         | 15 | 8          | 2  | 4   | 1  |

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Juni 2025)

### **Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja (Asset)**

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

### **Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025**

| No | Jenis Sarana dan Prasarana | Kondisi |                       | Jumlah |
|----|----------------------------|---------|-----------------------|--------|
|    |                            | Baik    | Rusak                 |        |
| 1  | Tanah Bangunan Kantor      |         | Bangunan Rusak Ringan | 1      |
| 2  | Kamera                     |         | Rusak Ringan          | 1      |
| 3  | Brankas                    | Baik    |                       | 2      |
| 4  | Meja 1 Biro                |         | Rusak                 | 2      |
| 5  | Meja 1/2 Biro              | 3 Baik  | 1 Rusak Ringan        | 4      |
|    |                            |         | 3 Rusak Ringan        | 3      |
| 6  | Mesin Ketik Manual         |         | 1 Rusak Ringan        | 1      |
| 7  | Lemari kayu                | 8 Baik  |                       | 8      |
| 8  | Podium                     |         | Rusak Ringan          | 1      |
| 9  | Bilboard                   |         | Rusak Ringan          | 1      |
| 10 | Printer                    |         | 4 Rusak Ringan        | 12     |
|    |                            | 10 Baik |                       |        |
| 11 | Faximile                   | Baik    |                       | 1      |
| 12 | Telepon                    |         | Rusak Ringan          | 1      |
| 13 | Sepeda Motor               | 59 Baik |                       | 60     |
|    |                            |         | 1 Rusak Berat         |        |
| 14 | Kursi                      | Baik    |                       | 3      |
| 15 | Kursi tamu                 | Baik    |                       | 1      |
| 16 | Kursi Putar                | Baik    |                       | 1      |
| 17 | Televisi                   | 2 Baik  |                       | 4      |
|    |                            |         | 2 Rusak Berat         |        |
|    |                            |         |                       |        |
| 18 | Kain Horden                | Baik    |                       | 1      |
| 19 | Karpet                     | Baik    |                       | 1      |
| 20 | PC. UNIT                   | 6 Baik  |                       | 16     |

|    |                                            |        |                 |    |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------------|----|
|    |                                            |        | 10 Rusak Ringan |    |
| 21 | UPS                                        |        | 3 Rusak Ringan  | 3  |
| 22 | Parabola                                   |        | Rusak Ringan    | 1  |
| 23 | Mobil Oprasional ( Mini Bus )              | 5 Baik |                 | 8  |
|    |                                            |        | 2 Rusak Ringan  |    |
|    | Truck                                      | 1 Baik |                 |    |
| 24 | Mesin potong rumput                        | Baik   |                 | 1  |
| 25 | Kursi plastik                              | Baik   |                 | 1  |
| 26 | Ac Split                                   | Baik   |                 | 15 |
| 27 | Laptop                                     | Baik   |                 | 10 |
| 28 | Rak Piring                                 | Baik   |                 | 1  |
| 29 | Tempat tidur                               | Baik   |                 | 1  |
| 30 | Kompor Gas                                 | Baik   |                 | 1  |
| 31 | Wireles                                    | Baik   |                 | 1  |
| 33 | Kipas Angin Walpan                         | Baik   |                 | 1  |
|    | Kipas Angin Berdiri                        | Baik   |                 | 1  |
| 34 | LCD Proyektor                              | 2 Baik |                 | 2  |
| 35 | Tong Air                                   | Baik   |                 | 1  |
| 36 | Mobil Operasional Antar Jemput Akseptor KB | 2 Baik |                 | 3  |
|    |                                            |        | 1 Rusak Berat   |    |
| 37 | Mesin Absensi                              | Baik   |                 |    |
| 38 | Kursi besi/metal                           | Baik   |                 | 3  |
| 39 | Balai Penyuluh KB Kecamatan                | Baik   |                 | 15 |

(Sumber : Data Subbag Keuangan dan Aset DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2025)

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan gambaran kinerja secara garis besar, hasil pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024 rata-rata mencapai realisasi 0,48 %.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) melebihi capaian target kinerja.

Adapun program yang mencapai realisasi 80% adalah program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

serta Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dan kegiatan Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Sedangkan Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 :

| Tabel 2.3                                                                                                     |                                                                                                     |                    |            |                          |                |       |       |       |        |                             |            |            |            |            |                              |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-------|-------|-------|------|
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |                                                                                                     |                    |            |                          |                |       |       |       |        |                             |            |            |            |            |                              |       |       |       |      |
| Kabupaten Sanggau                                                                                             |                                                                                                     |                    |            |                          |                |       |       |       |        |                             |            |            |            |            |                              |       |       |       |      |
| NO                                                                                                            | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DINSOSP3AKB                                               | Target NSPK        | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Capaian |       |       |       |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |            |            |            |            | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |       |       |       |      |
|                                                                                                               |                                                                                                     |                    |            |                          | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   | 2020                        | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2020                         | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4          | 5                        | 6              | 7     | 6     | 7     | 8      | 11                          | 12         | 11         | 12         | 13         | 16                           | 17    | 18    | 19    | 20   |
| 1.                                                                                                            | Rata-Rata Nilai Capaian SKP                                                                         |                    |            |                          | 80             |       |       |       |        | 80                          |            |            |            |            | 1                            |       |       |       |      |
| 2.                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                          |                    |            |                          | 91,84          | 92    | 92,8  | 93    | 93,80  | 91,87                       | 91,87      |            |            |            | 1,00                         |       |       |       |      |
| 3.                                                                                                            | Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan prima |                    |            |                          | 100            | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                         | 100        |            |            |            | 1,00                         |       |       |       |      |
| 4.                                                                                                            | Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau                                                            |                    |            |                          |                |       | 60,00 | 60,50 | 70,00  |                             |            | 69,50      | 69,72      | 69,72      |                              |       | 1,15  | 1,15  | 0,99 |
| 5.                                                                                                            | Persentase PMKS yang tertangani                                                                     | %                  |            |                          | 96,60          | 97,75 | 97,45 | 97,75 | 97,75  | 89,06                       | 97, 34     | 97, 45     | 97, 45     | 97, 60     | 0,92                         | 0,99  | 1     | 0,99  | 0,99 |
| 6.                                                                                                            | Persentase PMKS Yang difasilitasi                                                                   | %                  |            |                          | 100            | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                         | 100        | 100        | 100        | 100        | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1    |
| 7.                                                                                                            | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                    | %                  |            |                          | 61,35          | 61,42 | 61,54 | 61,65 | 61,65  | 61,78                       | 69,64      | 69,77      | 69,77      | 73,98      | 1,07                         | `1,13 | `1,13 | `1,13 | 1,2  |
| 8.                                                                                                            | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                     | %                  |            |                          | 80,55          | 80,62 | 80,74 | 80,98 | 80,85  | 80,55                       | 81,04      | 81,19      | 81,19      | 82,97      | 1                            | 1,05  | 1,00  | 1,00  | 1,02 |
| 9.                                                                                                            | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan                                            | %                  |            |                          | 30,10          | 30,15 | 30,10 | 30,15 | 30,15  | 18,3                        | 18,3       | 18,3       | 18,3       | 52,98      | 0,60                         | 0,60  | 0,60  | 0,60  | 0,60 |
| 10.                                                                                                           | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD                                                      | %                  |            |                          | 17,50          | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50  | 17,50                       | 17,50      | 17,50      | 17,50      | 20,00      | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1,14 |
| 11.                                                                                                           | Partisipasi perempuan dilembaga swasta                                                              | %                  |            |                          | 10,00          | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00  | 20,20                       | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 25,00      | 2,02                         | 1,25  | 1     | 0,83  | 0,71 |
| 12.                                                                                                           | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                | Per 1000 Perempuan |            |                          | 81,55          | 85,42 | 89,69 | 94,18 | 98,88  | 97,3                        | 97,3       | 97,3       | 97,3       | 97,3       | 1,19                         | 1,13  | 1,08  | 1,03  | 0,98 |
| 13.                                                                                                           | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                 | Per 1000 Perempuan |            |                          | 96,21          | 96,21 | 96,21 | 96,21 | 96,21  | 97,59                       | 97,06      | 97,06      | 97,06      | 1:1        | 1,01                         | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1:1  |
| 14.                                                                                                           | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                | %                  |            |                          | 60,67          | 60,67 | 60,67 | 60,67 | 60,67  | 65,84                       | 65,84      | 65,84      | 65,84      | 1:1        | 1,08                         | 1,08  | 1,08  | 1,08  | 1:1  |
| 15.                                                                                                           | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                | %                  |            |                          | 38,67          | 38,67 | 38,67 | 38,67 | 38,67  | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 16.                                                                                                           | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                                                   | %                  |            |                          | 2,14           | 2,14  | 2,14  | 2,14  | 2,14   | 0                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                            | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 17.                                                                                                           | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                       | %                  |            |                          | 0,71           | 0,71  | 0,71  | 0,71  | 0,71   | 0,68                        | 0,68       | 0,68       | 0,68       |            |                              |       |       |       |      |
| 18.                                                                                                           | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upah disektor non pertanian                                    | %                  |            |                          | 0,39           | 0,39  | 0,39  | 0,39  | 0,39   | 0,39                        | 0,39       | 0,39       | 0,39       | 0,39       | 1                            | 1     | 1     | 1     | 1    |
| 19.                                                                                                           | Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)                                                           |                    |            |                          | Madya          | Madya | Madya | Madya | Nindya | Pratama                     | Madya      | Pratama    | Madya      | Madya      |                              |       |       |       |      |
| 20.                                                                                                           | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                           |                    |            |                          | 1,32           | 1,3   | 1,32  | 1,3   | 1,28   | 1,68                        | 1,08       | 1,68       | 1,08       | 1,28       | 1,27                         | 0,83  | 1,27  | 0,83  | 1    |
| 21.                                                                                                           | Total Fertility Rate                                                                                |                    |            |                          | 2,22           | 2,22  | 2,22  | 2,22  | 2,22   | 2,21 point                  | 2,21 point | 2,21 point | 2,21 point | 2,21 point | 0,99                         | 0,99  | 0,99  | 0,99  | 0,99 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 21 indikator kinerja pada Renstra lima tahun selama tahun 2020-2024. Dapat dilihat bahwa dari 21 indikator kinerja yang ada hampir semua indikator menunjukkan tingkat capaian kinerja hampir 50 %. Hanya pada indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG masih terbilang rendah hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Daerah yang masih belum melaksanakan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), indikator perangkat tersebut memiliki tingkat capaian yang rendah sehingga pada Penyusunan Renja tahun 2020 telah diadakan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yaitu kegiatan Fasilitasi Pengaruutamaan Gender yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), karena dari 14 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baru terdapat 2 Kabupaten Kota yang mendapatkan penghargaan untuk Katergoti Anugrah Parahita Ekapraya (APE).

Pada tahun 2023 Dinsosp3akb mendapatkan Predikat Penghargaan APE Pratama merupakan suatu pencaiapain dalam Indikator ke dua yang masih memiliki tingkat capaian yang rendah yaitu indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peran aktif perempuan dalam mengisi kedudukan yang ada di lembaga legislative, sehingga peran perempuan sepertinya masih di anggap belum maksimal didalam lembaga legislative di Kabupaten Sanggau. Dari sekian banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Kab. Sanggau hanya ada 7 orang perempuan yang menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sanggau.

Untuk Indikator Persentase sama sekali tidak ada capaian kinerja hal ini di karenakan bahwa di Kabupaten Sanggau sendiri tidak terdapat anak yang bekerja dibawah umur, dari hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau

sendiri tidak memiliki wewenang dalam pemberian data pekerja anak dibawah umur.

Sedangkan untuk pelayanan yang telah tercapai salah satunya yaitu Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendapat perlindungan hukum. Perempuan dan anak tindak korban kekerasan telah berani melapor kepada aparat penegak hukum melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai sarana dalam memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan anak, sehingga hampir semua kasus tindak kekerasan yang terjadi dapat ditangani sesuai standar yang ada baik melalui mediasi dan apaarat penegak hukum. Diharapkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagn Anak dan Keluarga Berencana dapat menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

| Tabel 2.2                                                                                                                 |                     |                |                |                |                |      |      |                               |                |                |                |      |      |      |                                           |      |      |      |      |      |      |                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana |                     |                |                |                |                |      |      |                               |                |                |                |      |      |      |                                           |      |      |      |      |      |      |                       |           |
| Kabupaten Sanggau                                                                                                         |                     |                |                |                |                |      |      |                               |                |                |                |      |      |      |                                           |      |      |      |      |      |      |                       |           |
| uraian                                                                                                                    | Anggaran Pada Tahun |                |                |                |                |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                |                |                |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun |      |      |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|                                                                                                                           | 2020                | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025 | 2026 | 2020                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024 | 2025 | 2026 | 2020                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran              | Realisasi |
| 1                                                                                                                         | 2                   | 3              | 4              | 5              | 6              | 7    | 8    | 9                             | 10             | 11             | 12             | 13   | 14   | 15   | 16                                        | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23                    | 24        |
| Belanja Operasi                                                                                                           | 13.490.232.828      | 17.053.336.587 | 18.438.235.121 | 21.978.043.544 | 17.255.620.794 |      |      | 11.320.489.265                | 14.530.335.701 | 17.796.564.230 | 17.096.541.260 | 0    | 0    | 0    | 1                                         | 1    | 1    | 1    |      | 0    | 0    | 0,17                  | -0,37     |
| Belanja Modal                                                                                                             | 613.301.000         | 1.543.434.738  | 545.111.282    | 971.783.574    | 605.798.232    |      |      | 544.181.000                   | 1.493.248.600  | 454.890.790    | 965.767.005    | -    | -    | -    | 1                                         | 1    | 1    | 1    |      | 0    | 0    | 0,82                  | 0,79      |
| Belanja Tak Terduga                                                                                                       | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |      |      | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0    | 0    | 0    | 0                                         | 0    | 0    | 0    |      | 0    | 0    | 0,00                  | 0,00      |
| Jumlah                                                                                                                    | 14.103.533.828      | 18.596.771.325 | 18.983.346.403 | 22.949.827.118 | 17.861.419.026 |      |      | 11.864.670.265                | 16.023.548.301 | 18.251.455.020 | 18.062.308.265 | 0    | 0    | -    | 2                                         | 2    | 2    | 2    |      | 0    | 0    | 0,19                  | -0,34     |
|                                                                                                                           |                     |                |                |                |                |      |      |                               |                |                |                |      |      |      |                                           |      |      |      |      |      |      |                       |           |
|                                                                                                                           |                     |                |                |                |                |      |      |                               |                |                |                |      |      |      |                                           |      |      |      |      |      |      |                       |           |

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja operasi sebesar 0,25% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,19 % pertahun selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024 sedangkan untuk belanja modal rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,12% dan pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 0,07% hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas personil (sumber daya manusia) yang ada di Kecamatan seperti kurangnya tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah banyak memasuki masa pensiun sehingga banyak belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya tenaga lapangan tersebut. Selain kurangnya tenaga PLKB yang telah banyak memasuki masa pensiun, untuk kebutuhan sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana juga masih banyak terdapat kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga kurang optimalnya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia sendiri telah diusulkan melalui telaahan staf guna mencukupi kebutuhan pegawai lapangan dan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau

merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dengan prediksi anggaran defisit dan menurun setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan Kabupaten Sanggau di tahun mendatang sebagai berikut:

1. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
5. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Kabupaten Sanggau dengan OPD Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
8. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengurangi Belanja

Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran.

2.1.4 Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Daerah. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu Masyarakat miskin, lansia terlantar, anak terlantar, korban kekerasan anak dan perempuan serta masyarakat pada umumnya.

2.1.5 Kelompok Mitra kerja

Kelompok Mitra Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah merupakan Mitra kerja dalam mendukung pelayanan Dasar. Untuk urusan bidang sosial melakukan kerjasama dengan PT.POS Indonesia dalam penyaluran Bantuan untuk penyandang Disabilitas dan Lansia, serta Bank BUMN seperti BRI dalam penyaluran BPNT. Sedangkan untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalin kerjasama dengan Polres setempat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan TPPO. Sedangkan Mitra Kerja untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah PLKB, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan, sektor swasta dan Akademis.

➤ **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**

## **Berencana.**

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori; kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

### **A. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :**

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana lima tahun mendatang.

#### **1. Kekuatan (Strenght)**

Beberapa factor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut :

- b. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- c. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung demi meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sanggau.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya tenaga professional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal .
- b. Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi.

## B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah :

### 1. Peluang (Opportunities)

- Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
- Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sanggau sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi kegiatan tersebut.

## 2. Ancaman (Threats)

- ❖ Meningkatnya PMKS di Kabupaten Sanggau , dengan demikian menimbulkan kerentanan akan angka kemiskinan, hal ini merupakan mata rantai kemiskinan yang ada apabila rantai kemiskinan ini tidak diputus.
- ❖ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan sangat rentan terjadinya perdagangan orang serta terjadi perpindahan penduduk dan mata pencaharian untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan PMKS di Kabupaten Sanggau.

## 3. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor0faktor internal dan eksternal melalui analisi SWOT sebagai berikut:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah:
  - a) Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  - b) Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarag berencana.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (ST) adalah :
  - a) Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan

partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

- b) Memanfaatkan semangat dan motivasi aparaturnya agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul dimasyarakat baik masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
    - a) Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
    - b) Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
  4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
    - a) Tingkatkan Profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
    - b) Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

Tabel 2.7

#### Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

| INTERNAL | KEKUATAN (S)                                                                                                                                          | KELEMAHAN (W)                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbatasnya tenaga profesional yang tersedia</li> <li>➤ Fasilitasi sarana dan prasarana</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EKSTERNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan</p> <p>➤ Motivasi yang tinggi dimiliki dari aparatut Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.</p>                                                                                                                                                                        | <p>dibidang pelayan an belum memadai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>PELUANG (O)</p> <p>➤ Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</p> <p>➤ Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya SOTK Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sebagai landasan bekerja sesuai Tugas pokok dan fungsinya.</p> | <p>STRATEGI S+O</p> <p>➤ Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partidipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan msayarakat.</p> <p>➤ Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas melalui aparatut yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana .</p> | <p>STRATEGI W+O</p> <p>➤ Tingkatkan profesionalisme aparatut pemerintah dan mitra kerja peran masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>➤ Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> |
| <p>TANGTANGAN (T)</p> <p>➤ Tingginya angka PMKS</p> <p>➤ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STRATEGI S+O</p> <p>➤ Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>STRATEGI W+T</p> <p>➤ Tingkatkan profesionalisme aparatut pemerintah dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| langsung dengan Negara Malaysia. | <p>pihak pemerintahan daerah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.</p> <p>➤ Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul didalam masyarakat dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> | <p>mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu dalam penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</p> <p>➤ Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.</p> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah

sebagai berikut:

Table 2.8  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                                                                                                                                                     | Masalah                                                                                                                                                          | Akar Masalah                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Urusan Sosial                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 1  | Belum optimalnya/masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);                                                                       | - bahwa upaya yang dilakukan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat (PPKS) belum mencapai hasil yang maksimal.. | - kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak PPKS. |
| 2. | Belum optimalnya pendataan dan pemetaan Masyarakat miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti sosial; | - Belum sinergitas operator Desa dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial                                                                                           | - Kurangnya kerjasama Operator Desa/Perangkat Desa dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial terkait penerima manfaat.    |

|    |                                                                                                         |   |                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi;               | - | Kurangnya kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana                          | - | Adanya perubahan Iklim dan aktifitas manusia yang dapat merusak alam                                                                                                                  |
| 4. | Belum optimalnya sarana dan prasarana Shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar; |   | Shelter ODGJ sudah dibangun awal tahun 2023 namun belum difungsikan hingga saat ini. | - | Tidak Terupdatenya data penerima manfaat sehingga data tidak valid. Ada data yang telah meninggal dan pindah alamat tapi tidak melapor ke perangkat desa/operator desa                |
| 5. | Belum Optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; dan                                                   | - | Rendahnya Tingkat kepesertaan, belum tepat sasaran dan pendampingan yang lemah.      |   | Rendahnya tingkat kepesertaan dalam program jaminan sosial, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta tantangan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan. |

|                                                     |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.                                                  | Belum optimalnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti. | - | Adanya kesenjangan dalam Upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan ini, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar mereka di luar lingkungan panti . | - | Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, terbatasnya anggaran, sumber daya, kurang data dan informasi yang akurat, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat. |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                            |
| 1.                                                  | Belum optimalnya peran Perempuan dan anak dalam Pembangunan daerah                                                                                                              | - | Kurangnya keterlibatan Perempuan dalam sektor ekonomi, termasuk dalam industri dan kewirausahaan masih rendah.                                                                  | - | Kurangnya kesadaran akan pentingnya peran Perempuan dan anak, akses yang terbatas pada Pendidikan dan ekonomi, serta berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.           |
| 2.                                                  | Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait                                                                                                                     | - | Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait                                                                                                                                          | - | Belum optimalnya Sosialisasi kepada Masyarakat terkait                                                                                                                     |

|    |                                                                                        |   |                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | perlindungan khusus anak;                                                              |   | perlindungan khusus anak.                                                                                |   | perlindungan khusus anak.                                                                                                                                                                |
| 3. | Belum optimalnya pemenuhan hak Perempuan dan anak oleh pemerintah daerah;              | - | Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai hak-hak Perempuan dan anak.                                      | - | kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya data akurat, koordinasi yang belum optimal antar instansi, serta kurangnya pemahaman dan penerapan kebijakan yang responsif gender dan anak. |
| 4. | Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpisah;                                | - | kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya data gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan. |   | Belum optimalnya data Pilah yang ada utk pemanfaatan data Gender dan anak.                                                                                                               |
| 5. | Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memahami Perencanaan |   | Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak masih Belum Maksimal.                                      | - | Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan                                                                                                             |

|    |                                                                             |   |                                                                                       |   |                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);                       |   |                                                                                       |   | Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);                                                          |
| 6. | Perencanaan dan penganggaran belum berbasis responsif gender;               | - | Pembangunan Responsif Gender Belum Maksimal                                           | - | Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Perencanaan Penggaran Responsif Gender (PPRG) |
| 7. | Masih lemahnya kemandirian Perempuan di bidang ekonomi;                     | - | Kurangnya dukungan kebijakan dan Lembaga dalam pemenuhan hak Perempuan dalam bekerja. | - | Diskriminasi Gender dalam pekerjaan dan upah.                                                                              |
| 8. | Masih banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/ Trafficking; dan | - | Masih Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana       | - | Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                |   |                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                    |   | Perdagangan Orang (TPPO)                                                                                                       |   |                                                                          |
| 9. | Belum optimalnya penanganan terhadap tidak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.                                                                  |   | Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.                                  |   | Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak |
|    | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                |   |                                                                                                                                |   |                                                                          |
| 1. | Belum Optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap keluarga;                                               | - | Masih lemahnya koordinasi antar Instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan Data Keluarga | - | Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah                   |
| 2. | Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader keluarga Berencana dilapangan serta Tingkat pemahaman | - | Belum optimalnya SDM Penyuluh Lapangan keluarga berencana dan kader keluarga yang                                              | - | Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB                |

|    |                                                                                               |   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kader tentang<br>tupoksinya;                                                                  |   | mendapatkan<br>pembinaan.                                                                                                                                 |   |                                                                                            |
| 3. | Masih rendah<br>akseptor dan<br>partisipasi<br>keikutsertaan pria<br>dalam Program KB;<br>dan | - | Kurang<br>Partisipasi<br>Akseptor KB Pria                                                                                                                 | - | Akseptor KB non<br>MKJP masih cukup<br>besar                                               |
| 4. | Belum Optimalnya<br>pembinaan terhadap<br>ketahanan dan<br>kesejahteraan<br>keluarga.         | - | Kurangnya<br>partisipasi<br>anggota kelompok<br>UPPKS sdalam<br>melaksanakan<br>program kegiatan<br>yang<br>dilaksanakan<br>pemerintah                    | - | Kurangnya<br>fahamnya<br>masyarakat tentang<br>pentingnya<br>kelompok BKB,<br>BKR dan BKL. |
|    |                                                                                               |   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                            |
|    |                                                                                               | - | Masih lemahnya<br>koordinasi antar<br>Instansi dan<br>lembaga terkait,<br>terutama<br>permintaan data<br>mengenai<br>kependudukan<br>dan Data<br>Keluarga | - | Pemahaman<br>masyarakat tentang<br>kependudukan<br>masih rendah                            |

|  |  |   |                                                                                                                |   |                                                                             |
|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |                                                                                                                | - | Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB                   |
|  |  | - | Kurang Partisipasi Akseptor KB Pria                                                                            | - | Akseptor KB non MKJP masih cukup besar                                      |
|  |  | - | Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS sdalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah | - | Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL. |

sehingga permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan buah pikir dari proses diskusi dan telaah terhadap kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Sanggau. berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau:

#### 1. Urusan Sosial

- a. Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana
- b. Belum optimalnya /masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu penyandang kesejahteraan sosial (PPKS).
- c. Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi;
- d. Belum optimalnya shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar;

- e. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; dan
- f. Sulitnya memprediksi jumlah penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpebuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan
- b. Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait perlindungan anak;
- c. Belum ada dokumen data gender dan anak secara terpisah
- d. Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memahami perencanaan Pembangunan berbasis pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- e. Perencanaan dan penganggaran belum berbasis Responsig Gender;
- f. Masih lemahnya kemandirian perempuan di bidang ekonomi;
- g. Masih banyak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/ Trafficking; dan
- h. Belum optimalnya penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

## 3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi. Informasi dan Edukasi);
- b. Masih rendahnya kualitas SDM penyuluh Keluarga Berencana dilapangan serta Tingkat pemahaman kader tentang tupoksinya; dan
- c. Masih rendahnya Akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.

### **Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan

pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu selama 5 (Lima) tahun ke depan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pada dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, Ada 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Sanggau untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah:

1. Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur dasar;
2. Perbaikan dalam memberikan layanan Pendidikan, Kesehatan dan sosial yang bermutu;
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan sarana dan prasarana produksi;
4. Peningkatan pengetahuan, pelatihan dan keterampilan berbasis digital bagi pelaku UMKM dan Generasi muda;
5. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat;
6. Peningkatan kerukunan umat beragama;
7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan, kesejahteraan dan Profesionalisme ASN;
8. Pengoptimalan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
9. Pembangunan Perbatasan Negara

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik

maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Maka untuk tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Adapun Isu SPM Bidang Sosial tahun 2025 Adalah :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Graduasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial.
3. Pelayanan Pemberdayaan Rehabilitasi
4. Perlindungan dan jaminan sosial
5. Reformasi Birokrasi

#### **2.2.1. Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan penanganan PPKS namun cakupannya masih rendah.
2. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
3. Pertumbuhan dan Kesejahteraan penduduk

Seperti telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, diharapkan semua

kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.

Adapun teknik menyimpulkan Isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

| Tabel. 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD   |                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINSOSP3AKB | PERMASALAHAN DINSOSP3AKB                                                                                                                                         | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINSOSP3AKB | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINSOSP3AKB                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU STRATEGIS DINSOSP3AKB                                       |
|                                                    |                                                                                                                                                                  |                                          | GLOBAL (RPJMD)                                                                                            | NASIONAL (Renstra Kemensos, Kemen PPPA, Kemendug Bangsa)                                                                                                                                                                                                       | REGIONAL (Renstra Dinas Sosial, Dinas PPPA dan BKKBN Provinsi dan Rancangan RPJMD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| (1)                                                | (2)                                                                                                                                                              | (3)                                      | (4)                                                                                                       | (5)                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7)                                                             |
| Tata Kelola Pemerintahan                           | Belum Optimalnya tata kelola pelayanan publik                                                                                                                    |                                          | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif                                             | Integritas, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                          | Good Governance, penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kualitas Akuntabilitas Kinerja                                  |
| Layanan Sosial yang Bermutu                        | Belum optimalnya/ masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Belum Optimalnya pengelolaan DTKS.             |                                          | Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial                                                                         | Penanganan bencana alam dan sosial, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta lemahnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data sosial lainnya. Kemensos juga berupaya menyalurkan bantuan sosial secara efektif dan transparan. | Peyaluran Bantuan Sosial yang belum tepat sasaran dikarenakan Updating data secara berkala belum dilakukan secara memadai, disebabkan oleh kurangnya tenaga pendata yang bersertifikasi, keterbatasan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi, dan lemahnya integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data sosial lain. Akibatnya, banyak bantuan sosial yang belum tepat sasaran dan kurang efektif. | Adanya kewenangan penanganan PPKS namun cakupannya masih rendah |
| Peningkatan Kualitas Gender dan Perlindungan Anak  | Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan daerah;                                                                                              |                                          | perlindungan anak di dunia maya, kesetaraan gender, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak | kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, perkawinan anak, dan kesenjangan gender yang berdampak pada perempuan.                                                                                                                                              | Norma dan budaya masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, serta perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dianggap kelompok lemah, turut mendorong diskriminasi gender.                                                                                                                                                                                                            | Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.                              |
| Peningkatan kualitas kesehatan Keluarga            | Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh lapangan keluarga berencana dan Kader Keluarga Berencana serta tingkat pemahaman kader tentang tupoksinya |                                          | Ledakan Penduduk dan Demografi                                                                            | Sanitasi, ketersediaan air bersih, dan dampaknya terhadap stunting, serta isu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung keluarga yang berkualitas.                                                                               | Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan KB yang mudah dijangkau, khususnya di daerah terpencil. Ketersediaan tenaga medis dan petugas KB yang memadai juga masih menjadi tantangan, mengingat penyebaran fasilitas kesehatan belum merata dan sumber daya manusia kesehatan yang menangani KB masih terbatas.                                                                                       | Pertumbuhan dan Kesejahteraan Penduduk                          |



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

##### **3.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender
3. Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan
4. Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

#### **3.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.**

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak
3. Meningkatnya Keberhasilan Ber-KB
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut diatas terdapat indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

##### **➤ Indikator**

##### **1. Indikator tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana :**

1. Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Laju Pertumbuhan Penduduk
4. Nilai SAKIP

**2. Indikator sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

1. Persentase PPKS yang mandiri
2. Indeks pemberdayaan Gender (IDG)
3. Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)
4. Total Fertility Rate
5. Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kab.Sanggau

TABEL 3.3

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

| NO. | NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                          | TUJUAN                                                                                  | SASARAN                                                      | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                        | TARGET INDIKATOR KINERJA |        |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              |                                                                                 | 2025                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|     | (1)                                                                          | (2)                                                                                     | (3)                                                          | (4)                                                                             | (8)                      | (9)    | (10)   | (11)   | (12)   | (12)   |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah | Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau   | Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau                                        | 69,70%                   | 70,00% | 70,50% | 71,00% | 71,50% | 71,80% |
|     |                                                                              |                                                                                         | Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau | Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur | 90,95%                   | 91,00% | 91,50% | 92,00% | 92,50% | 93,00% |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              |                                                                                 |                          |        |        |        |        |        |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              |                                                                                 |                          |        |        |        |        |        |
| 2.  | Menurunnya kemiskinan                                                        | Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS                                       |                                                              | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                        | 47,25%                   | 47,50% | 48,00% | 48,50% | 49,00% | 50,00% |
|     |                                                                              |                                                                                         | Meningkatnya Kemandirian PPKS                                | Persentase PPKS yang Mandiri                                                    | 30,49                    | 30,55  | 31,00% | 31,50% | 32,00% | 32,50% |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              |                                                                                 |                          |        |        |        |        |        |
| 3.  | Meningkatnya kualitas gender                                                 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender                                                 | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender                      | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                 | 74,00                    | 74,50  | 75,00  | 84,50  | 85,00  | 85,50  |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                | 83,50                    | 83,50  | 84,00  | 84,50  | 85,00  | 85,50  |
|     |                                                                              |                                                                                         | Meningkatnya Pemenuhan hak Anak                              | Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)                                       | 700                      | 701    | 800    | 801    | 900    | 901    |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              |                                                                                 |                          |        |        |        |        |        |
| 4.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan                                              | Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan                                              | Meningkatnya Keberhasilan ber-KB                             | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                       | 1,70                     | 1,60   | 1,50   | 1,40   | 1,20   | 1,00   |
|     |                                                                              |                                                                                         |                                                              | Total Fertility Rate                                                            | 2,21                     | 2,18   | 2,16   | 2,14   | 2,12   | 2,1    |

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sug kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan /sasaran. Adapun penahapan Pembangunan yang dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat disajikan seperti pada table dibawah ini.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra DINSOSP3AKB

| TAHAP I<br>(2026)<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAHAP II<br>(2027)<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAHAP III<br>(2028)<br>(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAHAP IV<br>(2029)<br>(4)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAHAP V<br>(2030)<br>(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Daya Saing Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum                                                                                                                                                                                                                                            | Keberlanjutan Pembangunan Menuju Sanggau Berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Pembangunan Menuju Sanggau Berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penguatan Pembangunan Menuju Sanggau Berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemantapan Pembangunan Menuju Sanggau Berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meningkatkan kualitas Sumber Daya serta sarana dan prasarana disemua urusan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meningkatkan kualitas Sumber Daya serta sarana dan prasarana disemua urusan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meningkatkan kualitas Sumber Daya serta sarana dan prasarana disemua urusan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam memperkuat kualitas Sumber Daya serta sarana dan prasarana disemua urusan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pemantapan kualitas Sumber Daya serta sarana dan prasarana disemua urusan baik pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. |

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang

merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.

**TABEL 3.5**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

| NO. | OPERASIONALISASI NSPK                                                                   | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                            | ARAH KEBIJAKAN RESNTRA DINSOSP3AKB                                                                                                                                                                    | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                                                     | (3)                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                   | (5)        |
| 1.  | Terwujudnya SDM Unggul                                                                  | 1. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender                      | 1. Peningkatan Kesetaraan Gender (KG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Pelaksanaan, Perencanaan, Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG |            |
|     |                                                                                         | 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak                              | 2. Penyediaan Regulasi, penguatan kelembagaan, sarana prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan hasil Evaluasi KLA                                             |            |
| 2.  | Terkendalnya Laju Penduduk                                                              | 1. Meningkatnya Keberhasilan ber-KB                             | 1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.                                                                                                                       |            |
|     |                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |            |
|     | <b>TUJUAN</b>                                                                           | <b>SASARAN</b>                                                  | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                                                                       |            |
| 3.  | Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat                            | 1. Meningkatnya Kemandirian PPKS                                | 1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar sosial kepada masyarakat miskin                                                                                                                               |            |
|     |                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |            |
|     | <b>TUJUAN</b>                                                                           | <b>SASARAN</b>                                                  | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.  | Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau   | 1. Meningkatkan pelaporan akuntabilitas kinerja                                                                                                                                                       |            |
|     |                                                                                         | 2. Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau | 2. Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur DINSOSP3AKB Kab.Sanggau                                                                           |            |

Strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,

pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi Dinsosp3akb. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan. Keseluruhan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran tabel.

### **3.3 Strategi jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas penanganan PPKS
2. Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB

### **3.4 Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan data PPKS terpilah yang valid dan komprehensif
2. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya

5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta ketersediaan alat pelayanan kontrasepsi
6. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan program prioritas rencana jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Program prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 untuk dijabarkan ke dalam kegiatan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau serta berpedoman pada program dan pendanaan indikatif dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau.

Selama Lima tahun kedepan, Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau akan menjalankan program-program dalam rangka pemenuhan kepala daerah, sebagai berikut :

#### **Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau :**

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (KG)
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12. Program Perlindungan Khusus Anak
13. Program Pengendalian Penduduk
14. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
15. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025. Total program yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau Sebanyak 16 (Enam Belas) program, 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan dan 114 (Seratus Empat Belas) sub kegiatan.

Selanjutnya penjabaran dari semula program, kegiatan menjadi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau per sasaran strategis disajikan pada tabel 4.2 berikut ini:

| <p style="text-align: center;"><b>Tabel 4.2</b><br/> <b>Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DINSOSP3AKB</b><br/> <b>Kabupaten Sanggau</b></p> |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                               | TUJUAN                                                                                  | SASARAN                                                     | OUTCOME                                                                                                                    | OUTPUT                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                              | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                         | KETERANGAN |
| (1)                                                                                                                                                               | (2)                                                                                     | (3)                                                         | (4)                                                                                                                        | (5)                                                                           | (6)                                                                                                                                                                    | (7)                                                                                                                                   | (8)        |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah                                                                                      | Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab. Sanggau |                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             | Meningkatnya layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana |                                                                               | Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana                                             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun |                                                                                                                                                                        | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                             |                                                                                                                            |                                                                               | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |            |

|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                               |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi</b> |                                                                                                                                                      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                                                                                              | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD                                      |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                             | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun</b>                                            |                                                                                                                                                      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                    | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun</b>                                |                                                                                                                                                      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                            | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                   | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                                        |                                                                           |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan</b>          |                                                                                        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Penyediaan Bahan/Material                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun</b> |                                                                                        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan         |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Pengadaan Mebel                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b> |                                                                                        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                     |  |

|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                       |                                                   |                               |                                                                             | Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                           |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                  |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                          | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                           |  |
| Menurunnya kemiskinan | Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS |                               |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   | Meningkatnya Kemandirian PPKS |                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   |                               | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial                                            |                                                                                                                  | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti Rehabilitasi sosial                                                                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                               |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti Rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial                                                                                                               |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             | Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan                                      |                                                                                                                                                                                                                   | Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                                    | Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                               |  |
|                       |                                                   |                               | Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan |                                                                                                                  | Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan                                                                                                    | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                                                                            |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi yang dipulangkan ke daerah asalnya. |                                                                                                                                                                                                                   | Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk pemulangan ke Desa /                 |  |
|                       |                                                   |                               |                                                                             |                                                                                                                  | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota             | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |  |

|  |  |  |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial |                                                                                      | Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                         | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Persentase Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                  | Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar |                                                                                                                                                                                                       | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial                  |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | Penyediaan Permakanaan                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                                                    |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota          | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.             |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota,                 | Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak                                                                        |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                               | Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                  |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                                       |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Pemberian layanan kedaruratan                                                                                                                                              |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                | Pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                                                                   |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | Pemberian Layanan Rujukan.                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                  |                                                                                      | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota |  |

|  |  |  |                                              |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                             |  |
|--|--|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial |                                                                                                      | Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar                                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi                                                   |                                                             |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin                                  |                                                             |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Peningkatan Indeks kebutuhan dasar                                                                               |                                                             |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Peningkatan Indeks keberdayaan ekonomi                                                                           |                                                             |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan              |                                                             |  |
|  |  |  |                                              | Persentase (%) Anak Terlantar Terpenuhi Kebutuhan dasarnya                                           |                                                                                                                  | Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                   |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Penjangkauan Anak-anak Terlantar                            |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Rujukan Anak-anak Terlantar                                 |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar |  |
|  |  |  |                                              | Persentase Orang Miskin yang masuk dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            |  |
|  |  |  |                                              |                                                                                                      | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |

|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                         |                                                  | Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana                                                 |                                                                                                      | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana.                          | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat                                                                                                    |                                                                                           |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial                                                                                             |                                                                                           |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 | Persentase (%) korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 (satu) tahun |                                                                                                                                                                 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                         |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Penyediaan Makanan                                                                        |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Sandang                                                                        |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                   |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                    |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                            |  |
|                              |                                         |                                                  | Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan                                                   |                                                                                                      | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik.                                                                                             | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                          |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara                                                     |                                                                                                                                                                 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                 |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                 |  |
| Meningkatnya kualitas gender | Terwujudnya peningkatan Kualitas Gender |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|                              |                                         | Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                           |  |
|                              |                                         |                                                  | Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran perempuan dalam pembangunan |                                                                                                      | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                                                                                      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                                                                             |                                                                                           |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 | Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan                               |                                                                                                                                                                 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                              | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota               |  |
|                              |                                         |                                                  |                                                                                                 |                                                                                                      | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)                            | Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                    |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                                                                                               | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                          | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |  |
|  |  |  |  | <b>Persentase Organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan</b>                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                        | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                    | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                                                                                                    | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                                                  | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                           | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                       | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota |  |

|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan                                                                                     |                                                                                                                                                                               | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                                                                                 | Program Perlindungan Perempuan                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                                             | Ratio KDRT                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      | Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, Kabupaten/Kota serta Kab/Kota                                                 | Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |                                                                                                                             | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       |                                                                                                                                                                                                                      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota       |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan                                                                                                                                       | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota                            |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan korban pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                             |  |
|  |  |  |                                                                                                                             | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit |                                                                                                                                                                                                                      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                                                                    | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                |  |
|  |  |  | Meningkatnya Kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak |                                                                                                                                                                               | Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar                                                                                                                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                                             | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1 (satu) tahun                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan untuk keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                        |  |
|  |  |  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |  |

|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                               | Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun |                                                                                                                                                | Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah                |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                           | peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |  |
|  |  |  |                                               | Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun |                                                                                                                                                | Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                   | layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                      |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                        | layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota                                                 |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                                       | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                          |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                        | Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                              |  |
|  |  |  | Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak |                                                                                                                                                | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, Evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan                                             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                               | Persentase (%) Dokumen Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi                                                                       |                                                                                                                                                | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          |  |
|  |  |  |                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia Kabupaten/Kota                                                                               | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |  |

|  |  |  | Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komperhensif |                                                                                                                              | Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                                                                                                                                | Program Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                          | Persentase (%) Peran Aktif Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota    |  |
|  |  |  |                                                          | Persentase (%) Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.            |                                                                                                                                                                                                                                | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                                                                                                                               | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                                                                                                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Desa/Kelurahan Yang Dibina                                                                                                                                       | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Desa/Kelurahan Yang Dibina                                                                                                                                       | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                                                                                          | Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                                                                              | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |  |

|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                 |                                          |                                  | Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penculikan, dan perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak |                                                                                      | Persentase Anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif                                                                                                     | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                          |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Indeks Pelelindungan Khusus Anak (IPKA)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            | Persentase (%) Dokumen Hasil kebijakan perlindungan khusus anak dalam 1 (satu) tahun |                                                                                                                                                                                          | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota                                                                                                                           | Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            | Persentase (%) AMPK yang mendapatkan layanan dalam 1 (satu) tahun                    |                                                                                                                                                                                          | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                 |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                     | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                                       |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                      | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                        |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                          | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                              |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                      |  |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan | Terkendalinya Laju pengendalian Penduduk |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |  |
|                                 |                                          | Meningkatnya Keberhasilan Ber KB | Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk                                                                                                  |                                                                                      | Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)                                                                                                              | Program Pengendalian Penduduk                                                                                                                                             |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non Formal                       |                                                                                                                                                                                          | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                       |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.                                                                           | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.                                                                           |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)                          | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                               |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan                                                                                                       | Kerjasama Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal                                                                                                     |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal |  |
|                                 |                                          |                                  |                                                                                                                                            |                                                                                      | Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                               | Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |  |

|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                                     | <b>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                                                                                                                          | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                              |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                                                                                                    | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                                                                        | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Rumah Data Kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk.                                                                                        | Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor lain.                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk                                                                                         | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain                                         |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b> |                                                                                                                  | <b>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mpcr)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>                                                                                                                                |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | <b>Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet need)</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |  |
|  |  |  |                                                                                                     | <b>Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                                  |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan hasil pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                                            | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                                                    | Pengelolaan Operasional dan Saran di Balai Penyuluh Bangsa Kencana                                                                                                              |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Kecamatan (Rakordes) dan Mini Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Kecamatan (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                                                         | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang.                                                                         |  |
|  |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                  | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                                        | Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja                                                                                          |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b>                         |                                                                                                                                                                                    | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)                                                                                                                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  |
|  |  |  |  | <b>Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                   | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (DAU+DAK) (MKJP)                                                                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.                                                          |  |
|  |  |  |  | <b>Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB              | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                 |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                         | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                         |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                             | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 |  |

|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KSEJ) |                                                                                                            | Persentase Keluarga Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                                 | Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            | Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                         | Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                                                                                     | Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan)                                                                                                                                                      | Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi)                                                                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga> |  |
|  |  |  |                                                                                                 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                    |  |
|  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                            | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan                                                                                                                                     | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                                                                                                  |  |

Dari table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 15 (Lima Belas) program serta 36 (Lima Puluh Enam) kegiatan dan 114 Sub Kegiatan yang membidangi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Dari semua program dan kegiatan tersebut telah mencakup tujuan dan sasaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang telah termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029.

Pembangunan pemberdayaan perempuan di kabupaten Sanggau diselenggarakan melalui berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan meningkatnya peran atau partisipasi perempuan dalam segala bidang, yaitu meliputi hukum, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya. Atas dasar ini, kebijakan terhadap masalah perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu mengembangkan potensi dirinya, mengakses sumber daya ekonomi, dan mewujudkan jati dirinya serta kiprah dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 (tiga) program yaitu :

- ✓ Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

- ✓ Indikator Kinerja Program

- 1. Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Komitmen terhadap KLA

- 2. Rasio KDRT

- 3. Rasio Trafficking

- ✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- ✓ Indikator Kinerja Program

- 1. Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- ✓ Indikator Kinerja Program

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan program ini adalah peningkatan SDM perempuan melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.

Tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah : terwujudnya peningkatan SDM perempuan dan persentase keterwakilan perempuan dibidang politik dan jabatan publik dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan penguatan peran lembaga pemberdayaan perempuan dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Peningkatan SDM pelayanan Pendamping korban KDRT
- b. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan melalui :

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan

Tujuan dari program ini adalah pembinaan terhadap perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Pembinaan organisasi perempuan
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Gender dalam kesetaraan Gender
- c. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

- d. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
- e. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- ✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuannya adalah Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan pengembangan kreatifitas dan bakat anak Kab. Sanggau.
- b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
- c. Fasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak
- d. Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan Anak

## 2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Umum urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 (Empat) Program.

Untuk Mewujudkan peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam sistem Jaminan Kesehatan melalui :

- ✓ Program Keluarga Berencana
- ✓ Indikator Program

### 1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif

Tujuan dari program ini adalah pepaduan kebijakan pelayanan KB yang merata, berkualitas, peningkatan pelayanan KB serta peningkatan Kapasitas PLKB dan Tenaga Medis dalam mendukung Penggerakan dan Penyuluhan KB.

- ✓ Program Kesehatan reproduksi Remaja
- ✓ Indikator Program

Tujuan program ini adalah : Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi remaja.

✓ Program Pelayanan Kontrasepsi

✓ Indikator Program

1. Persentase Peserta KB MKJP

Tujuan Program ini adalah : Meningkatkan peran serta Akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yang berkualitas.

✓ Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

✓ Indikator Program

Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)

Tujuan Program ini adalah : Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera.

3. Urusan Sosial

Kebijakan umum urusan sosial adalah :

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Tolak ukur dari program ini adalah meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui :

✓ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

✓ Indikator dari Program ini adalah Persentase PMKS yang tertangani.

Program ini bertujuan mewujudkan pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Tolak ukur dari program ini adalah terwujudnya melalui peningkatan pemberdayaan sosial, peningkatan pengembangan sumber potensi sumber kesejahteraan dan peningkatan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKS) serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

- ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase PMKS yang ditangani  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, ketahanan sosial khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat / relawan sosial.

Tolak ukur keberhasilan program ini adalah meningkatnya prosentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan pokok dari kegiatan ini adalah rehabilitasi sosial yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

- ✓ Program Pembinaan Penyandang Disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Trauma.
- ✓ Indikator Program ini adalah:
  1. Persentase Penyandang Disabilitas dan Trauma yang tertangani
  2. Persentase ODGJ yang ditangani

Kedua hal tersebut diatas lah yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program tersebut.

Tujuan dari program ini adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi para penyandang Disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan fasilitas pengantaran ke Rumah sakit Jiwa serta penjemputan kembali Orang dengan gangguan jiwa bila dinyatakan sudah sembuh oleh Tim Medis.

- ✓ Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo  
Tujuan dari program ini adalah terwujudnya pembinaan panti asuhan melalui kegiatan rehabilitasi dan operasional bagi panti asuhan.
- ✓ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang di bina.

Tujuan dari program ini adalah peningkatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan sosial, sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

- ✓ Indikator dari program ini adalah Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak. Rumah tidak layak huni ini sendiri yang memiliki Prinsip Gotong royong, kerjasama serta asas kekeluargaan dalam prinsip Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase pelestarian Taman Makam Nasional/Monumen Nilai Kepahlawanan.

Tujuan Kegiatan pokok dari program ini adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional serta pengenalan nilai-nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial.

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 adalah selama Lima tahun. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 3 (tiga urusan) yaitu Urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk mencapai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana memiliki indikator yang sangat mendukung untuk pencapaian target kinerja selama tahun 2025-2030.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 4.3 berikut

Tabel. 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| Bidang<br>Urusan/Program/Outco<br>me/Kegiatan/Sub<br>Kegiatan Output              | Indikator outcome /<br>output                                                                                                                                                                   | Baseline<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Keterangan  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                  | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                  | Target                          | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |             |
| (1)                                                                               | (2)                                                                                                                                                                                             | (3)              | (4)                             | (5)           | (6)        | (7)           | (8)        | (9)           | (10)       | (11)          | (12)       | (13)          | (14)        |
|                                                                                   | Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                     | 69,70%           | 71,00%                          |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Nilai AKIP<br>DINSOSP3AKB<br>Kabupaten Sanggau                                                                                                                                                  | 69,70%           | 71,00%                          |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | 71,00%     |               | DINSOSP3AKB |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Indikator Program :<br>Ketersediaan layanan<br>administrasi<br>perkantoran yang<br>mendukung<br>kelancaran tugas dan<br>fungsi Dinas Sosial,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan Anak | 100%             | 100%                            | 5.768.603.733 | 100%       | 6.914.130.416 | 100%       | 6.979.763.141 | 100%       | 6.996.063.141 | 100%       | 7.009.863.141 | DINSOSP3AKB |
| Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang di susun                                                                                                      | 26 Dokumen       | 26 Dokumen                      | 43.278.127    | 26 Dokumen | 49.020.660    | 26 Dokumen | 49.020.660    | 26 Dokumen | 49.020.660    | 26 Dokumen | 49.020.660    |             |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                             | Sasaran : Dokumen<br>Perencanaan<br>Dinsosp3akb<br>Kab.Sanggau                                                                                                                                  | 11 Dok           | 11 Dok                          | 16.236.636    | 7 Dok      | 9.336.060     | 11 Dok     | 9.336.060     | 7 Dok      | 9.336.060     | 7 Dok      | 9.336.060     | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Indikator Keluaran<br>:Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                        | 100%             | 100%                            |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                   | Indikator Hasil : Tingkat<br>Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                  |                  |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                  | Sasaran : Dokumen<br>RKA Dinsosp3akb<br>Kab.Sanggau                                                                                                                                             | 2 Dok            | 2 Dok                           | 3.761.192     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Indikator Keluaran :<br>Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                              | 100%             | 100%                            |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                   | Indikator Hasil : Tingkat<br>Pemenuhan Jumlah<br>Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                             |                  |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                        | Sasaran : Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>Dinsosp3akb Kab.<br>Sanggau                                                                                                                          | 2 Dok            | 2 Dok                           | 3.761.523     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | 2 Dok      | 6.980.160     | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Indikator Keluaran :<br>Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD<br>dan laporan hasil<br>koordinasi penyusunan                                                                                      | 100%             | 100%                            |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                   | Indikator Hasil : Tingkat<br>Pemenuhan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                                                                                                      |                  |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Sasaran : DPA Dinsosp3akb Kab.Sanggau                                                                                                                                                       | 1 Dok     | 1 Dok     | 3.499.331 | 1 Dok     | 5.111.040 | 1 Dok     | 5.111.040 | 1 Dok     | 5.111.040 | 1 Dok     | 5.111.040 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                       | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 100%      | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           |             |
|                                                                                       | Indikator Hasil :Tingkat Pemenuhan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Sasaran : Perubahan DPA Dinsosp3akb Kab.Sanggau                                                                                                                                             | 1 Dok     | 1 Dok     | 3.479.795 | 1 Dok     | 4.348.980 | 1 Dok     | 4.348.980 | 1 Dok     | 4.348.980 | 1 Dok     | 4.348.980 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                       | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 100%      | 100%      |           | 100%      |           |           |           |           |           |           |           |             |
|                                                                                       | Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sasaran : Dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                        | 4 Laporan | 2 Laporan | 5.529.821 | 2 Laporan | 6.810.330 | 2 Laporan | 6.810.330 | 2 Laporan | 6.810.330 | 2 Laporan | 6.810.330 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                       | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100%      | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           |             |
|                                                                                       | Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SPIP                                                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Sasaran : Dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                        | 8 Laporan | 4 Laporan | 7.009.829 | 4 Laporan | 9.453.930 | 4 Laporan | 9.453.930 | 4 Laporan | 9.453.930 | 4 Laporan | 9.453.930 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                       | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 100%      | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           | 100%      |           |             |
|                                                                                       | Indikator Hasil : Tingkat pemenuhan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Pelaksanaan Perangkat Berdasarkan Urusan yang dalam Penyusunan Perencanaan Daerah | Forum Daerah Bidang Diampu Rangka Dokumen Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                     | Sasaran : Kelompok sasaran dan Mitra Kerja Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                      | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 5.529.821            | 1 Berita Acara | 5.529.821            | 1 Berita Acara | 5.529.821            | 1 Berita Acara | 5.529.821            | 1 Berita Acara | 5.529.821            |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Hasil : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |                |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun dalam satu tahun</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          | <b>30 Dok</b>  | <b>30 Dok</b>  | <b>4.873.070.527</b> | <b>30 Dok</b>  | <b>5.297.759.742</b> | <b>30 Dok</b>  | <b>5.341.292.467</b> | <b>30 Dok</b>  | <b>5.343.292.467</b> | <b>30 Dok</b>  | <b>5.344.292.467</b> |             |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau |                                                                                                                                                                          | 35 Orang       | 35 Orang       | 3.117.357.199        | 42 Orang       | 3.399.771.578        | 42 Orang       | 3.399.771.578        | 42 Orang       | 3.399.771.578        | 42 Orang       | 3.399.771.578        | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | 100%           | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      |             |
|                                                                                   | Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | Sasaran : TPP ASN dan P3K                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | 12 Dok         | 12 Dok         | 1.514.849.864        | 12 Dok         | 1.649.376.092        | 12 Dok         | 1.649.376.092        | 12 Dok         | 1.649.376.092        | 12 Dok         | 1.649.376.092        | DINSOSP3AKB |
|                                                                                   | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | 100%           | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      | 100%           |                      |             |
|                                                                                   | Indikator Hasil : Tingkat Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                      |             |

|                                                                  |                                                                                                                                                      |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Sasaran : Pelaksanaan Verifikasi Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                            | 1 Dok | 1 Dok | 167.263.947 | 1 Dok | 170.006.045 | 1 Dok | 212.438.912 | 1 Dok | 212.438.912 | 1 Dok | 212.438.912 | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                             | 100%  | 100%  |             | 100%  |             |       |             |       |             |       |             |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                             |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |             |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Sasaran : Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                     | 1 Dok | 1 Dok | 54.026.697  | 1 Dok | 54.026.697  | 1 Dok | 55.000.000  | 1 Dok | 57.000.000  | 1 Dok | 58.000.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                        | 100%  | 100%  |             | 100%  |             |       |             |       |             |       |             |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Sasaran : Laporan Keuangan Akhir tahun Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                      | 1 Lap | 1 Lap | 2.975.722   | 1 Lap | 5.413.914   | 1 Lap | 5.413.914   | 1 Lap | 5.413.914   | 1 Lap | 5.413.914   | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD               | 100%  | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |             |
| Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan            | Sasaran : LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                           | 1 Dok | 1 Dok | 9.789.268   | 1 Dok | 9.789.268   | 1 Dok | 9.789.268   | 1 Dok | 9.789.268   | 1 Dok | 9.789.268   | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                        | 100%  | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             | 100%  |             |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tingkat Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |             |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SRJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb              | 12 Lap       | 12 Lap       | 5.081.114         | 12 Lap       | 5.935.703         | 12 Lap       | 5.935.703         | 12 Lap       | 5.935.703         | 12 Lap       | 5.935.703         | DINSOSP3AKB |
|                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                                                            | 100%         | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   |             |
|                                                                             | Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                                               |              |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |             |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran              | Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau | 2 Dok        | 2 Dok        | 1.726.716         | 2 Dok        | 3.440.445         | 2 Dok        | 3.567.000         | 2 Dok        | 3.567.000         | 2 Dok        | 3.567.000         | DINSOSP3AKB |
|                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                                        | 100%         | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   | 100%         |                   |             |
|                                                                             | Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                                                                           |              |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |             |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun selama satu tahun</b>                                                                                                                                                                       | <b>8 Dok</b> | <b>8 Dok</b> | <b>21.564.705</b> | <b>8 Dok</b> | <b>31.615.354</b> | <b>8 Dok</b> | <b>31.815.354</b> | <b>8 Dok</b> | <b>32.315.354</b> | <b>8 Dok</b> | <b>32.815.354</b> |             |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                   | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                                                                                                   | 2 Dok        | 2 Dok        | 2.187.255         | 2 Dok        | 6.280.424         | 2 Dok        | 6.280.424         | 2 Dok        | 6.280.424         | 2 Dok        | 6.280.424         | DINSOSP3AKB |
|                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                         | 80%          | 80%          |                   | 80%          |                   | 80%          |                   | 80%          |                   | 80%          |                   |             |
|                                                                             | Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun                                                                                                                                                              |              |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |             |

|                                                        |                                                                                          |              |              |                   |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                    | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                             | 2 Dok        | 2 Dok        | 7.020.030         | 2 Dok        | 8.534.930          | 2 Dok        | 8.534.930          | 2 Dok        | 8.534.930          | 2 Dok        | 8.534.930          | DINSOSP3AKB        |
|                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun          | 80%          | 80%          |                   | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    |                    |
|                                                        | Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun        |              |              |                   |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |                    |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD            | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                             | 3 Lap        | 3 Lap        | 12.357.420        | 3 Lap        | 16.800.000         | 3 Lap        | 17.000.000         | 3 Lap        | 17.500.000         | 3 Lap        | 18.000.000         | DINSOSP3AKB        |
|                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD          | 80%          | 80%          |                   | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    |                    |
|                                                        | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |              |              |                   |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |                    |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       | <b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun</b>            | <b>8 Dok</b> | <b>8 Dok</b> | <b>16.331.030</b> | <b>8 Dok</b> | <b>148.568.016</b> | <b>8 Dok</b> | <b>149.068.016</b> | <b>8 Dok</b> | <b>149.168.016</b> | <b>8 Dok</b> | <b>149.268.016</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Sasaran : Pakaian Dinas Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau                                    | 63 Stel      | -            | -                 | 63 Stel      | 47.223.000         | 63 Stel      | 47.223.000         | 63 Stel      | 47.223.000         | 63 Stel      | 47.223.000         | DINSOSP3AKB        |
|                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan          | 80%          | 80%          |                   | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    |                    |
|                                                        | Indikator Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan        |              |              |                   |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |                    |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | Sasaran : ASN dan Tenaga Kontrak Dinsosp3akb Kab.Sanggau                                 | 2 Dok        | 2 Dok        | 5.134.971         | 2 Dok        | 6.621.194          | 2 Dok        | 6.621.194          | 2 Dok        | 6.621.194          | 2 Dok        | 6.621.194          | DINSOSP3AKB        |
|                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun                | 80%          | 80%          |                   | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    | 80%          |                    |                    |
|                                                        | Indikator Hasil : Tersedianya laporan administrasi kepegawaian yang disusun              |              |              |                   |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |                    |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------|
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau | 2 Dok    | 2 Dok    | 6.621.194 | 2 Dok    | 6.296.060  | 2 Dok    | 6.296.060  | 2 Dok    | 6.296.060  | 2 Dok    | 6.296.060  | DINSOSP3AKB |
|                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                              | 80%      | 80%      |           | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            |             |
|                                                               | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                     |          |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |             |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai            | Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau | 1 Dok    | 1 Dok    | 4.574.865 | 1 Dok    | 4.651.762  | 1 Dok    | 4.651.762  | 1 Dok    | 4.651.762  | 1 Dok    | 4.651.762  | DINSOSP3AKB |
|                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                        | 80%      | 80%      |           | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            |             |
|                                                               | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |             |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau | 16 Orang | 16 Orang | -         | 16 Orang | 77.776.000 | 16 Orang | 77.776.000 | 16 Orang | 77.776.000 | 16 Orang | 77.776.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                       | 80%      | 80%      |           | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            | 80%      |            |             |
|                                                               | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |          |            |          |            |          |            |          |            |             |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                | Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Statuis CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau | 35 Orang    | 35 Orang    | -                  | 35 Orang    | 6.000.000          | 35 Orang    | 6.500.000          | 35 Orang    | 6.600.000          | 35 Orang    | 6.700.000          | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                      | 80%         | 80%         |                    | 80%         |                    | 80%         |                    | 80%         |                    | 80%         |                    |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>235.337.441</b> | <b>100%</b> | <b>334.301.141</b> | <b>100%</b> | <b>341.701.141</b> | <b>100%</b> | <b>344.401.141</b> | <b>100%</b> | <b>344.601.141</b> |             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Paket     | 5 Paket     | 9.343.980          | 5 Paket     | 9.500.000          | 5 Paket     | 9.500.000          | 5 Paket     | 10.000.000         | 5 Paket     | 10.000.000         | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                        | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Komponen Instalasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 Paket    | 12 Paket    | 30.913.500         | 12 Paket    | 45.431.980         | 12 Paket    | 46.431.980         | 12 Paket    | 47.431.980         | 12 Paket    | 47.431.980         | DINSOSP3AKB |
|                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                                  | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

|                                                          |                                                                                                            |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan                | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                               | 8 Paket   | 8 Paket   | 28.535.658 | 8 Paket   | 31.000.000 | 8 Paket   | 32.000.000 | 8 Paket   | 33.000.000 | 8 Paket   | 33.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 100%      | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                          | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                               | 1.095 Dok | 1.095 Dok | 6.603.490  | 1.095 Dok | 9.088.000  | 1.095 Dok | 9.088.000  | 1.095 Dok | 9.088.000  | 1.095 Dok | 9.088.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 100%      | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                          | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Penyediaan Bahan/Material                                | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                               | 12 Paket  | 12 Paket  | 24.115.000 | 12 Paket  | 24.500.000 | 12 Paket  | 24.600.000 | 12 Paket  | 24.700.000 | 12 Paket  | 24.800.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Paket bahan Material disediakan                                                | 100%      | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                          | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket bahan Material disediakan                                       |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                               | 12 Lap    | 12 Lap    | 1.298.700  | 12 Lap    | 6.000.000  | 12 Lap    | 6.000.000  | 12 Lap    | 6.000.000  | 12 Lap    | 6.000.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 100%      | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                          | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |           |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |             |

|                                                                         |                                                                                                                     |                |                |             |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                        | 192 OH         | 192 OH         | 120.381.000 | 192 OH         | 195.000.000        | 192 OH         | 200.000.000        | 192 OH         | 200.000.000        | 192 OH         | 200.000.000        | DINSOSP3AKB |
|                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 100%           | 100%           |             | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    |             |
|                                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |                |             |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                        | 5 Dok          | 5 Dok          | 8.570.199   | 5 Dok          | 8.570.199          | 5 Dok          | 8.570.199          | 5 Dok          | 8.570.199          | 5 Dok          | 8.570.199          | DINSOSP3AKB |
|                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 100%           | 100%           |             | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    |             |
|                                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |                |             |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                        | 1 Dok          | 1 Dok          | 5.575.914   | 1 Dok          | 5.210.962          | 1 Dok          | 5.510.962          | 1 Dok          | 5.610.962          | 1 Dok          | 5.710.962          | DINSOSP3AKB |
|                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 100%           | 100%           |             | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    |             |
|                                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |                |             |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                | <b>20 Unit</b> | <b>20 Unit</b> | <b>-</b>    | <b>20 Unit</b> | <b>333.800.000</b> | <b>20 Unit</b> | <b>343.800.000</b> | <b>20 Unit</b> | <b>353.800.000</b> | <b>20 Unit</b> | <b>363.800.000</b> | DINSOSP3AKB |
| Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan       | Sasaran : Kendaraan Operasional/Jabatan Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                    | 1 Unit         | 1 Unit         | -           | 1 Unit         | 163.800.000        | 1 Unit         | 163.800.000        | 1 Unit         | 163.800.000        | 1 Unit         | 163.800.000        |             |
|                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 100%           | 100%           |             | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    | 100%           |                    |             |
|                                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                        |                |                |             |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |             |

|                                                         |                                                                                                                      |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Pengadaan Mebel                                         | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                         | 9 Unit      | 9 Unit      | -                  | 9 Unit      | 120.000.000        | 9 Unit      | 120.000.000        | 9 Unit      | 120.000.000        | 9 Unit      | 120.000.000        | DINSOSP3AKB |
|                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                              | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                         | 9 Unit      | 9 Unit      | -                  | 9 Unit      | 50.000.000         | 9 Unit      | 60.000.000         | 9 Unit      | 70.000.000         | 9 Unit      | 80.000.000         | DINSOSP3AKB |
|                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                         | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>                                                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>298.686.760</b> | <b>100%</b> | <b>301.686.760</b> | <b>100%</b> | <b>305.686.760</b> | <b>100%</b> | <b>306.686.760</b> | <b>100%</b> | <b>308.686.760</b> | DINSOSP3AKB |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                         | 256 Lap     | 256 Lap     | 2.472.000          | 256 Lap     | 2.472.000          | 256 Lap     | 2.472.000          | 256 Lap     | 2.472.000          | 256 Lap     | 2.472.000          |             |
|                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya benda pos yang disediakan untuk surat menyurat                                         |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                         | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 172.608.700        | 12 Laporan  | 175.608.700        | 12 Laporan  | 177.608.700        | 12 Laporan  | 178.608.700        | 12 Laporan  | 179.608.700        | DINSOSP3AKB |
|                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                         | 12 Lap      | 12 Lap      | 123.606.060        | 12 Lap      | 123.606.060        | 12 Lap      | 125.606.060        | 12 Lap      | 125.606.060        | 12 Lap      | 126.606.060        | DINSOSP3AKB |
|                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

| Pemeliharaan Milik Pemerintah Daerah                                     | Barang Daerah Urusan Pelihara           | Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara                                                                                      | 100%    | 100%    | 280.335.143 | 100%    | 417.378.743 | 100%    | 417.378.743 | 100%    | 417.378.743 | 100%    | 417.378.743 | DINSOSP3AKB |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
| Penyediaan Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Kendaraan Operasional Lapangan | Jasa Biaya , Pajak Perizinan Dinas atau | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                         | 10 Unit | 10 Unit | 158.791.200 | 10 Unit | 287.594.800 | 10 Unit | 287.594.800 | 10 Unit | 287.594.800 | 10 Unit | 287.594.800 |             |
|                                                                          |                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya          | 100%    | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             |             |
|                                                                          |                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |         |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |             |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                         | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                         | 40 Unit | 40 Unit | 21.360.000  | 40 Unit | 29.600.000  | 40 Unit | 29.600.000  | 40 Unit | 29.600.000  | 40 Unit | 29.600.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                          |                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                              | 100%    | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             |             |
|                                                                          |                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |         |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |             |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            |                                         | Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau                                                                         | 1 Unit  | 1 Unit  | 100.183.943 | 1 Unit  | 100.183.943 | 1 Unit  | 100.183.943 | 1 Unit  | 100.183.943 | 1 Unit  | 100.183.943 | DINSOSP3AKB |
|                                                                          |                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 100%    | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             |             |
|                                                                          |                                         | Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |         |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |             |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                              |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                                                                                                            | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)                                                                                                     | 47,25%    | 47,50%    |            | 48,00%    |             | 48,50%    |             | 49,00%    |             | 50,00%    |             | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                            | Persentase PPKS yang mandiri                                                                                                                                 | 30,49     | 30,55     |            | 31,00%    |             | 31,50%    |             | 32,00%    |             | 32,50%    |             | DINSOSP3AKB |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                         | Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial                                                                      | 100%      | 100%      | 94.117.540 | 100%      | 210.000.000 | 100%      | 215.000.000 | 100%      | 215.000.000 | 100%      | 215.000.000 | DINSOSP3AKB |
| Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapat pengembangan kapasitas                                                                          | 100%      | 100%      | 94.117.540 | 100%      | 210.000.000 | 100%      | 215.000.000 | 100%      | 215.000.000 | 100%      | 215.000.000 |             |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Sasaran : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 15 Orang  | 15 Orang  | 67.332.785 | -         | -           | -         | -           | -         | -           | -         | -           | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota         | 100%      | 100%      |            | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 26.784.755 | 4 Lembaga | 150.000.000 | 4 Lembaga | 150.000.000 | 4 Lembaga | 150.000.000 | 4 Lembaga | 150.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                            | Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                             |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |           |           |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                        | Sasaran : Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                                                                                      | 100 Orang        | 100 Orang        | -                 | 100 Orang        | 60.000.000        | 100 Orang        | 65.000.000        | 100 Orang        | 65.000.000        | 100 Orang        | 65.000.000        | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                              |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |
|                                                                                                                                                          | Indikator Hasil : Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                                 |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |
| <b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>                                                                                    | <b>Jumlah warga Negara Migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan</b>                                                                                                                       | <b>100 Orang</b> | <b>110 Orang</b> | <b>24.876.805</b> | <b>120 Orang</b> | <b>31.420.076</b> | <b>130 Orang</b> | <b>32.000.000</b> | <b>140 Orang</b> | <b>32.000.000</b> | <b>150 Orang</b> | <b>32.000.000</b> | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                          | <b>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani</b>                                                                                                                                                    | <b>80%</b>       | <b>80%</b>       | <b>24.876.805</b> | <b>80%</b>       | <b>31.420.076</b> | <b>80%</b>       | <b>32.000.000</b> | <b>80%</b>       | <b>32.000.000</b> | <b>80%</b>       | <b>32.000.000</b> | DINSOSP3AKB |
| <b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk pemulangan ke Desa /</b>          | <b>Indikator Kegiatan : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.</b>                                                                                      | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>24.876.805</b> | <b>100%</b>      | <b>31.420.076</b> | <b>100%</b>      | <b>32.000.000</b> | <b>100%</b>      | <b>32.000.000</b> | <b>100%</b>      | <b>32.000.000</b> | DINSOSP3AKB |
| Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Sasaran : Warga Migran                                                                                                                                                                                                           | 200 Orang        | 200 Orang        | 24.876.805        | 200 Orang        | 31.420.076        | 200 Orang        | 32.000.000        | 200 Orang        | 32.000.000        | 200 Orang        | 32.000.000        |             |
|                                                                                                                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota        |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |
|                                                                                                                                                          | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                               | Persentase penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                            | 100%      | 100%      | 2.507.685.450 | 100%      | 2.901.121.956 | 100%      | 2.924.942.497 | 100%      | 2.929.042.497 | 100%      | 2.932.142.497 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                           | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                              | 100%      | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               |             |
|                                                                                                                                                           | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                       | 100%      | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               |             |
|                                                                                                                                                           | Persentase Gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                                                                                      | 100%      | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               |             |
| Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasra Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial | Indikator Kegiatan : Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                | 100%      | 100%      | 2.507.685.450 | 100%      | 2.901.121.956 | 100%      | 2.924.942.497 | 100%      | 2.929.042.497 | 100%      | 2.932.142.497 |             |
| Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | Sasaran : Lanjut Usia Terlantar                                                                                                                          | 250 Orang | 250 Orang | 19.623.003    | 250 Orang | 25.000.000    | 250 Orang | 26.000.000    | 250 Orang | 27.000.000    | 250 Orang | 28.000.000    | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                           | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota           | 100%      | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               |             |
|                                                                                                                                                           | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |             |
| Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | Sasaran : Lanjut Usia Terlantar                                                                                                                          | 36 Orang  | 36 Orang  | 10.600.000,00 | 36 Orang  | 49.999.727    | 36 Orang  | 49.999.727    | 36 Orang  | 49.999.727    | 36 Orang  | 49.999.727    | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                           | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 100%      | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               | 100%      |               |             |
|                                                                                                                                                           | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |             |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                          | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                             | 7 Orang    | 7 Orang    | 25.525.700    | 12 Orang   | 43.758.342    | 15 Orang   | 54.697.928    | 15 Orang   | 54.697.928    | 15 Orang   | 54.697.928    | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran :Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 100%       | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
| Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                         | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                             | 120 Orang  | 120 Orang  | 2.380.000     | 30 Orang   | 19.999.993    | 30 Orang   | 19.999.993    | 30 Orang   | 19.999.993    | 30 Orang   | 19.999.993    | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | 100%       | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
| Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                                                                                        | Sasaran : Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar                                                                                                                                                                           | 250 Orang  | 250 Orang  | 105.099.909   | 250 Orang  | 106.099.909   | 250 Orang  | 107.099.909   | 250 Orang  | 108.099.909   | 250 Orang  | 109.099.909   | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | 100%       | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |
| Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                             | 1000 Orang | 1000 Orang | 2.128.405.174 | 1000 Orang | 2.191.218.992 | 1000 Orang | 2.200.000.000 | 1000 Orang | 2.200.000.000 | 1000 Orang | 2.200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran :Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             | 100%       | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               | 100%       |               |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |            |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |             |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |           |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                           | 10 Orang  | 10 Orang  | 4.000.000,00 | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -         | -          | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota, | 100%      | 100%      |              | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                                                                | Indikator Hasil : Terpuhinya Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak                                                                           |           |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                      | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                           | 141 Orang | 141 Orang | 44.195.800   | 141 Orang | 45.195.800 | 141 Orang | 46.195.800 | 141 Orang | 47.195.800 | 141 Orang | 47.195.800 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               | 100%      | 100%      |              | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                                                                | Indikator Hasil : TerpuhinyaJumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        |           |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                           | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                           | 40 Orang  | 40 Orang  | 4.225.106,00 | 40 Orang  | 20.000.094 | 40 Orang  | 20.000.094 | 40 Orang  | 20.000.094 | 40 Orang  | 20.000.094 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 100%      | 100%      |              | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                                                                | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                            |           |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Pemberian layanan kedaruratan                                                                  | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                           | 10 Orang  | 10 Orang  | 4.244.425    | 10 Orang  | 4.500.000  | 10 Orang  | 4.600.000  | 10 Orang  | 4.700.000  | 10 Orang  | 4.800.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 100%      | 100%      |              | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                                                                                | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                 |           |           |              |           |            |           |            |           |            |           |            |             |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Pemberian pelayanan penelusuran keluarga                                                                                                                                   | Sasaran : Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                                  | 20 Orang  | 20 Orang  | 5.800.000   | 20 Orang  | 9.999.943   | 20 Orang  | 9.999.943   | 20 Orang  | 9.999.943   | 20 Orang  | 9.999.943   | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                       | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Pemberian Layanan Rujukan.                                                                                                                                                 | Sasaran : Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)                                                                                                                                                                                       | 370 Orang | 370 Orang | 153.586.333 | 370 Orang | 370.349.103 | 370 Orang | 370.349.103 | 370 Orang | 370.349.103 | 370 Orang | 370.349.103 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Keluaran: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                            | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                    |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis                                                                                                                                  | 10 Orang  | 10 Orang  | -           | 10 Orang  | 15.000.053  | 10 Orang  | 16.000.000  | 10 Orang  | 17.000.000  | 10 Orang  | 18.000.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Keluaran: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota         | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                  |                                                                                                            |             |             |                    |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | <b>Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar</b>                                          | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  | <b>432.053.140</b> | <b>80%</b>  | <b>1.525.094.346</b> | <b>80%</b>  | <b>1.525.094.346</b> | <b>80%</b>  | <b>1.525.094.346</b> | <b>80%</b>  | <b>1.525.094.346</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                  | <b>Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi</b>                                      | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  |                    | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      |                    |
|                                                  | <b>Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin</b>                     | <b>90%</b>  | <b>90%</b>  |                    | <b>90%</b>  |                      | <b>90%</b>  |                      | <b>90%</b>  |                      | <b>90%</b>  |                      |                    |
|                                                  | <b>Peningkatan Indeks kebutuhan dasar</b>                                                                  | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  |                    | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      |                    |
|                                                  | <b>Peningkatan Indeks keberdayaan ekonomi</b>                                                              | <b>80%</b>  | <b>80%</b>  |                    | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      | <b>80%</b>  |                      |                    |
|                                                  | <b>Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan</b> | <b>10%</b>  | <b>10%</b>  |                    | <b>10%</b>  |                      | <b>10%</b>  |                      | <b>10%</b>  |                      | <b>10%</b>  |                      |                    |
| <b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b> | <b>Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya</b>                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>110.536.414</b> | <b>100%</b> | <b>175.094.346</b>   | <b>100%</b> | <b>175.094.346</b>   | <b>100%</b> | <b>175.094.346</b>   | <b>100%</b> | <b>175.094.346</b>   |                    |
| Penjangkauan Anak-anak Terlantar                 | Sasaran : Anak-anak Terlantar                                                                              | 10 Orang    | 10 Orang    | 1.737.245          | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | DINSOSP3AKB        |
|                                                  | Indikator Keluaran: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                      | 100%        |                      | 100%        |                      | 100%        |                      |                    |
|                                                  | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota         |             |             |                    |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
| Rujukan Anak-anak Terlantar                      | Sasaran : Anak-anak Terlantar                                                                              | 10 Orang    | 10 Orang    | 1.999.443          | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | 10 Orang    | 5.000.000            | DINSOSP3AKB        |
|                                                  | Indikator Keluaran: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota             | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                      | 100%        |                      | 100%        |                      | 100%        |                      |                    |
|                                                  | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota  |             |             |                    |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |

|                                                                    |                                                                                                                                              |                  |                  |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Terlantar             | Sasaran : Panti Asuhan dan Anak Terlantar                                                                                                    | 608 Orang        | 608 Orang        | 106.799.726        | 608 Orang    | 165.094.346          | 608 Orang    | 165.094.346          | 608 Orang    | 165.094.346          | 608 Orang    | 165.094.346          | DINSOSP3AKB |
|                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 100%             | 100%             |                    | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      |             |
|                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                  |                  |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |
| <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> | Persentase Orang Miskin yang masuk dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                         | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>321.516.726</b> | <b>100%</b>  | <b>1.350.000.000</b> | <b>100%</b>  | <b>1.350.000.000</b> | <b>100%</b>  | <b>1.350.000.000</b> | <b>100%</b>  | <b>1.350.000.000</b> |             |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota               | Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau                                                                                                        | 150.000 Orang    | 150.000 Orng     | 186.978.450        | 150.000 Orng | 450.000.000          | 150.000 Orng | 450.000.000          | 150.000 Orng | 450.000.000          | 150.000 Orng | 450.000.000          | DINSOSP3AKB |
|                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           | 100%             | 100%             |                    | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      |             |
|                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                    |                  |                  |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau                                                                                                        | 49.957 Keluarga  | 49.957 Keluarga  | 19.334.890         | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | DINSOSP3AKB |
|                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan                              | 100%             | 100%             |                    | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      | 100%         |                      |             |
|                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan                       |                  |                  |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                   | Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau                                                                                                        | 125.448 Keluarga | 125.448 Keluarga | 83.492.145,86      | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | -            | -                    | DINSOSP3AKB |
|                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 100%             | 100%             |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |
|                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Orang Miskin yang masuk dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                        |                  |                  |                    |              |                      |              |                      |              |                      |              |                      |             |

|                                                            |                                                                                                                                                 |           |           |               |              |             |              |             |              |             |              |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat         | Sasaran : Penduduk Miskin dan KUBE Kab.Sanggau                                                                                                  | 100 Orang | 100 Orang | 31.711.240,60 | 100 Orang    | 100.000.000 | 100 Orang    | 100.000.000 | 100 Orang    | 100.000.000 | 100 Orang    | 100.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 100%      | 100%      |               | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             |             |
|                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                       |           |           |               |              |             |              |             |              |             |              |             |             |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga           | Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau                                                                                                           | -         | -         | -             | 20 Orang     | 400.000.000 | 20 Orang     | 400.000.000 | 20 Orang     | 400.000.000 | 20 Orang     | 400.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota              | 100%      | 100%      |               | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             |             |
|                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota    |           |           |               |              |             |              |             |              |             |              |             |             |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot | Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau                                                                                                           | -         | -         | -             | 1.000 Usulan | 400.000.000 | 1.000 Usulan | 400.000.000 | 1.000 Usulan | 400.000.000 | 1.000 Usulan | 400.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan           | 100%      | 100%      |               | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             |             |
|                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan |           |           |               |              |             |              |             |              |             |              |             |             |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                        | <b>Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana.</b>                                                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>325.929.141</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> |             |
|                                                                          | <b>Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat Kesiapsiagaannya.</b>                                                                                                          | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           |             |
|                                                                          | <b>Persentase Korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial</b>                                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>-</b>           |             |
| <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b> | Persentase (%) korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 (satu) tahun                                                                                           | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>325.929.141</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | <b>100%</b> | <b>399.046.491</b> | DINSOSP3AKB |
| Penyediaan Makanan                                                       | Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial                                                                                                                                               | 300 Orang   | 300 Orang   | 304.037.410        | 300 Orang   | 304.037.410        | 300 Orang   | 304.037.410        | 300 Orang   | 304.037.410        | 300 Orang   | 304.037.410        |             |
|                                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                                          | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Penyediaan Sandang                                                       | Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial                                                                                                                                               | 300 Orang   | 300 Orang   | 13.076.211         | 300 Orang   | 30.003.866         | 300 Orang   | 30.003.866         | 300 Orang   | 30.003.866         | 300 Orang   | 30.003.866         | DINSOSP3AKB |
|                                                                          | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota           | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |             |
|                                                                          | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

|                                         |                                                                                                                            |           |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial                                                                           | 15 Unit   | 15 Unit   | 3.527.420 | -         | -          | -         | -          | -         | -          | -         | -          | DINSOSP3AKB |
|                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | 100%      | 100%      |           |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
|                                         | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |           |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial                                                                           | 300 Orang | 300 Orang | 3.377.500 | 300 Orang | 62.805.215 | 300 Orang | 62.805.215 | 300 Orang | 62.805.215 | 300 Orang | 62.805.215 | DINSOSP3AKB |
|                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota        | 100%      | 100%      |           | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                         | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota |           |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |             |
| Pelayanan Dukungan Psikososial          | Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial                                                                           | 300 Orang | 300 Orang | 1.910.600 | 300 Orang | 2.200.000  | 300 Orang | 2.200.000  | 300 Orang | 2.200.000  | 300 Orang | 2.200.000  | DINSOSP3AKB |
|                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota         | 100%      | 100%      |           | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            | 100%      |            |             |
|                                         | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota  |           |           |           |           |            |           |            |           |            |           |            |             |

|                                                                                            |                                                                                                                     |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik.</b>                                                   | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    | <b>267.833.780</b> | <b>100%</b>    | <b>200.000.000</b> | <b>100%</b>    | <b>200.000.000</b> | <b>100%</b>   | <b>200.000.000</b> | <b>100%</b>    | <b>200.000.000</b> | DINSOSP3AKB        |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                  | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara                                                                    | 100%           | 100%           | 267.833.780        | 100%           | 200.000.000        | 100%           | 200.000.000        | 100%          | 200.000.000        | 100%           | 200.000.000        |                    |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                  | Sasaran : Taman Makam Pahlawan                                                                                      | 3 TMP          | 3 TMP          | 267.833.780        | 3 TMP          | 200.000.000        | 3 TMP          | 200.000.000        | 3 TMP         | 200.000.000        | 3 TMP          | 200.000.000        |                    |
|                                                                                            | Indikator Keluaran :Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota          |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |
|                                                                                            | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |
|                                                                                            |                                                                                                                     |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |
|                                                                                            | <b>Indeks Pembangunan Gender (IDG)</b>                                                                              | <b>74,00</b>   | <b>74,00</b>   |                    | <b>74,50</b>   |                    | <b>75,00</b>   |                    | <b>75,50</b>  |                    | <b>76,00</b>   |                    | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                            | <b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>                                                                              | <b>83,50</b>   | <b>83,50</b>   |                    | <b>83,50</b>   |                    | <b>84,00</b>   |                    | <b>84,50</b>  |                    | <b>85,00</b>   |                    | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                            | <b>Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)</b>                                                                    | <b>690</b>     | <b>701</b>     |                    | <b>730</b>     |                    | <b>760</b>     |                    | <b>801</b>    |                    | <b>801</b>     |                    |                    |
| <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                           | <b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>                                                                   | <b>13,00 %</b> | <b>13,00 %</b> | <b>215.560.088</b> | <b>13,00 %</b> | <b>230.457.336</b> | <b>13,50 %</b> | <b>230.457.336</b> | <b>14,00%</b> | <b>230.457.336</b> | <b>14,50 %</b> | <b>230.457.336</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                            | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>                                                          | 87,44          | 87,44          |                    | 89,14          |                    | 90,93          |                    | 92,74         |                    | 94,6           |                    |                    |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Indikator Kegiatan : Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan                         | 100%           | 100%           | 51.871.832         | 100%           | -                  | 100%           |                    | 100%          |                    | 100%           |                    |                    |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                | Sasaran : Dokumen APE                                                                                               | 40 Orang       | 40 Orang       | 51.871.832         | -              | -                  |                |                    |               |                    |                |                    | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                            | Indikator Keluaran :Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG               |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |
|                                                                                            | Indikator Hasil : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                 |                |                |                    |                |                    |                |                    |               |                    |                |                    |                    |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | Sasaran : Dokumen APE                                                                                                                                                                                         | -            | -            | -                  | 28 Lembaga  | 51.871.832         | 28 Lembaga  | 53.000.000         | 28 Lembaga  | 54.000.000         | 28 Lembaga  | 55.000.000         | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                  | Indikator Keluaran :Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)                                                      |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                  | Indikator Hasil : Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)                                                        |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Indikator Kegiatan : Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>163.688.256</b> | <b>100%</b> | <b>230.457.336</b> | <b>100%</b> | <b>230.457.336</b> | <b>100%</b> | <b>230.457.336</b> | <b>100%</b> | <b>230.457.336</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                       | Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus                                                                                                                                                                           | 1 Dok        | 1 Dok        | 48.459.588         | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                  | Indikator Hasil: Tersusunnya Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                     | Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus                                                                                                                                                                           | 2 Organisasi | 2 Organisasi | 115.228.668        | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                  | Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                  | Indikator Hasil: Terpenuhiya Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |              |              |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                               |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi         | Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus                                                                                                           | -           | -           | -                    | 3 Lembaga   | 115.228.668          | 3 Lembaga   | 115.228.668          | 3 Lembaga   | 115.228.668          | 3 Lembaga   | 115.228.668          | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                      | Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                                |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
|                                                                                                                      | Indikator Hasil: Terpenuhi Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                          |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi         | Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus                                                                                                           | -           | -           | -                    | 80 Orang    | 115.228.668          | 80 Orang    | 115.228.668          | 80 Orang    | 115.228.668          | 80 Orang    | 115.228.668          | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                      | Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                                |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
|                                                                                                                      | Indikator Hasil: Terpenuhi Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi                          |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan</b>                         | <b>Indikator Kegiatan : Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan</b>                                                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>1.613.904.482</b> | <b>100%</b> | <b>1.098.791.210</b> | <b>100%</b> | <b>1.098.791.210</b> | <b>100%</b> | <b>1.098.791.210</b> | <b>100%</b> | <b>1.098.791.210</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Organisasi Perempuan                                                                                                                | 31 Lembaga  | 31 Lembaga  | 1.488.639.625        | -           | -                    | -           | -                    | -           | -                    | -           | -                    |                    |
|                                                                                                                      | Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 100%        | 100%        |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |
|                                                                                                                      | Indikator Hasil : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan    |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |                    |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |           |           |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Layanan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                              | 200 Orang | 200 Orang | 38.692.571 | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 100%      | 100%      |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhi sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |           |           |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu                                                                                               | 1 Lap     | 1 Lap     | 86.572.286 | -          | -           | -          | -           | -          | -           | -          | -           | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia             |           |           |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu                                                             |           |           |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu                                                                                               | -         | -         | -          | 31 Lembaga | 946.096.260 | 31 Lembaga | 946.096.260 | 31 Lembaga | 946.096.260 | 31 Lembaga | 946.096.260 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                             | Indikator Keluaran : jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                                             |           |           |            | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             |             |
|                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhi jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                                      |           |           |            |            |             |            |             |            |             |            |             |             |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                    |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu                                                                                                               | -                  | -                  | -                  | 2 Dok       | 114.002.527        | 2 Dok       | 114.002.527        | 2 Dok       | 114.002.527        | 2 Dok       | 114.002.527        | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                        | Indikator Keluaran :Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                            |                    |                    |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |                    |
|                                                                                                                                        | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                 |                    |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu                                                                                                               |                    |                    |                    | 1 Lap       | 38.692.423         | 1 Lap       | 38.692.423         | 1 Lap       | 38.692.423         | 1 Lap       | 38.692.423         | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                        | Indikator keluaran :jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota |                    |                    |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |                    |
|                                                                                                                                        | Indikator Hasil : Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota   |                    |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| <b>Program Perlindungan Perempuan</b>                                                                                                  | <b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b>                                                                           | <b>100%</b>        | <b>100%</b>        | <b>173.462.876</b> | <b>100%</b> | <b>257.327.351</b> | <b>100%</b> | <b>257.327.351</b> | <b>100%</b> | <b>257.327.351</b> | <b>100%</b> | <b>257.327.351</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| <b>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                          | <b>Indikator Kegiatan :Ratio KDRT</b>                                                                                                                                 | 0,0046             | 0,0046             | <b>113.119.561</b> | 0,0046      | <b>113.119.561</b> | 0,0046      | <b>113.119.561</b> | 0,0046      | <b>113.119.561</b> | 0,0046      | <b>113.119.561</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | <b>Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan</b>                                                                                                                     | 3 Perangkat Daerah | 3 Perangkat Daerah | 113.119.561        | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 100%               | 100%               |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                        | Indikator Hasil : Terpenuhinya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan                                                |                    |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |          |          |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan                                                                                                                                               | -        | -        | -          | 6 Lembaga | 113.119.561 | 6 Lembaga | 113.119.561 | 6 Lembaga | 113.119.561 | 6 Lembaga | 113.119.561 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                 | Indikator Keluaran :Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota            |          |          |            | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                 | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota |          |          |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Indikator Kegiatan :Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</b>                       | 100%     | 100%     | 29.270.104 | 100%      | 144.207.790 | 100%      | 144.207.790 | 100%      | 144.207.790 | 100%      | 144.207.790 | DINSOSP3AKB |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota                              | Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan                                                                                                                                               | 25 Orang | 25 Orang | 29.270.104 | -         | -           |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                                                 | Indikator Keluaran : Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan                                                                                      | 100%     | 100%     |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                                                 | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan                                                                            |          |          |            |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                              | Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan                                                                                                                                                               | -                | -                | -                 | 25 Orang    | 144.207.790 | 25 Orang    | 144.207.790 | 25 Orang    | 144.207.790 | 25 Orang    | 144.207.790 | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                 | Indikator Keluaran :Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                        |                  |                  |                   | 100%        |             | 100%        |             | 100%        |             | 100%        |             |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                            |                  |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Indikator Keluaran :Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</b> | <b>100%</b>      | <b>100%</b>      | <b>31.073.211</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>    | <b>100%</b> |             | <b>100%</b> |             | <b>100%</b> |             | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran : Perempuan dalam kondisi darurat                                                                                                                                                                | <b>100 Orang</b> | <b>100 Orang</b> | 31.073.211        | -           | -           |             |             |             |             |             |             |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                                   |                  |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Hasil :Terpenuhi nya Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                                |                  |                  |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--------------------|
| <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                            | <b>Pembelajaran keluarga<br/>(Puspaga) yang<br/>berperspektif Gender<br/>dan Hak Anak sesuai<br/>Standar</b>                                                                                                                                                            | <b>100%</b>           | <b>100%</b>           | <b>219.816.665,00</b> | <b>100%</b> |   | <b>100%</b> | - | <b>100%</b> | - | <b>100%</b> | - | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| <b>Peningkatan Kualitas<br/>Keluarga dalam<br/>mewujudkan<br/>Kesetaraan Gender<br/>(KG) dan Hak Anak<br/>Tingkat Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>Indikator Keluaran :<br/>Persentase (%)<br/>Perangkat Daerah<br/>yang mendapat<br/>Advokasi dan<br/>Pendampingan<br/>Keluarga yang<br/>terpenuhi dalam 1</b>                                                                                                         | <b>100%</b>           | <b>100%</b>           | <b>219.816.665,00</b> | <b>100%</b> | - | <b>100%</b> | - | <b>100%</b> | - | <b>100%</b> | - | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Advokasi Kebijakan dan<br>Pendampingan untuk<br>mewujudkan KG dan<br>Perlindungan Anak<br>Kewenangan                                            | Sasaran : Keluarga dan<br>Anak                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Perangkat<br>Daerah | 3 Perangkat<br>Daerah | 100.000.000,00        | -           | - |             |   |             |   |             |   |                    |
|                                                                                                                                                 | Indikator Keluaran :<br>Jumlah Perangkat<br>Daerah yang mendapat<br>Advokasi dan<br>pendampingan keluarga<br>untuk mewujudkan<br>kesetaraan gender (KG)<br>dan Perlindungan Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Spesifik |                       |                       |                       |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |
|                                                                                                                                                 | Indikator Hasil<br>:Terpenuhinya<br>Perangkat Daerah yang<br>mendapat Advokasi dan<br>pendampingan keluarga<br>untuk mewujudkan<br>kesetaraan gender (KG)<br>dan Perlindungan Anak<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan           |                       |                       |                       |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |
| Pengembangan Kegiatan<br>Masyarakat untuk<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                      | Sasaran : Keluarga dan<br>Anak                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dok                 | 1 Dok                 | 119.816.665           | -           | - |             |   |             |   |             |   |                    |
|                                                                                                                                                 | Indikator Keluaran<br>:Jumlah Lembaga<br>Penyedia Layanan<br>Peningkatan Kualitas<br>Keluarga yang<br>mendapatkan advokasi<br>dan sosialisasi<br>pengembangan<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                           |                       |                       |                       |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |
|                                                                                                                                                 | Indikator Hasil<br>:Terpenuhinya Jumlah<br>Lembaga Penyedia<br>Layanan Peningkatan<br>Kualitas Keluarga yang<br>mendapatkan advokasi<br>dan sosialisasi<br>pengembangan<br>kewenangan                                                                                   |                       |                       |                       |             |   |             |   |             |   |             |   |                    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |   |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Indikator Keluaran :<br>Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluargayang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun | 100% | 100% | - | 100%       | 400.000.000 | 100%       | 400.000.000 | 100%       | 400.000.000 | 100%       | 400.000.000 | DINSOSP3AKB |
| peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | Sasaran : Lembaga Penyedia Layanan                                                                                                                                               | -    | -    | - | 10 Lembaga | 200.000.000 | 10 Lembaga | 200.000.000 | 10 Lembaga | 200.000.000 | 10 Lembaga | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                      | Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                         |      |      |   |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|                                                                                                                                                                      | Indikator Hasil :Terpenuhinya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                               |      |      |   |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
| Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Sasaran : Lembaga Penyedia Layanan                                                                                                                                               | -    | -    | - | 2 Lembaga  | 200.000.000 | 2 Lembaga  | 200.000.000 | 2 Lembaga  | 200.000.000 | 2 Lembaga  | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                      | Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota               |      |      |   |            |             |            |             |            |             |            |             |             |
|                                                                                                                                                                      | Indikator Hasil :Terpenuhinya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota     |      |      |   |            |             |            |             |            |             |            |             |             |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |      |      |               |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang kerjanya wilayah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator Keluaran :<br>Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun | 100% | 100% | 52.080.728,00 | 100%     | 350.000.000 | 100%     | 350.000.000 | 100%     | 350.000.000 | 100%     | 350.000.000 | DINSOSP3AKB |
| layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                | Sasaran : Anak Korban Kekerasan                                                                                                                                                   | -    | -    |               | 25 Orang | 200.000.000 | 25 Orang | 200.000.000 | 25 Orang | 200.000.000 | 25 Orang | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran :<br>Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                              |      |      |               |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil :<br>Terpenuhinya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                    |      |      |               |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
| layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota                                           | Sasaran : Anak Korban Kekerasan                                                                                                                                                   | -    | -    |               | 70 Orang | 100.000.000 | 70 Orang | 100.000.000 | 70 Orang | 100.000.000 | 70 Orang | 100.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                | Indikator Keluaran :<br>Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                   |      |      |               |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|                                                                                                                                                                | Indikator Hasil :<br>Terpenuhinya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                         |      |      |               |          |             |          |             |          |             |          |             |             |

|                                                                                                                             |                                                                                                                        |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                 | Sasaran : Anak Korban Kekerasan                                                                                        | -           | -           |            | 40 Orang    | 100.000.000 | 40 Orang    | 100.000.000 | 40 Orang    | 100.000.000 | 40 Orang    | 100.000.000 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota          |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|                                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                     | Sasaran : Anak Korban Kekerasan                                                                                        | -           | -           |            | 150 Orang   | 100.000.000 | 150 Orang   | 100.000.000 | 150 Orang   | 100.000.000 | 150 Orang   | 100.000.000 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                             | Indikator Keluaran :Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota            |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|                                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhiya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota  |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| <b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>                                                                      | <b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, Evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan</b>              | <b>100%</b> | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |             | <b>100%</b> |             | <b>100%</b> |             | <b>100%</b> |             | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indikator Kegiatan :Persentase (%) Dokumen Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi                           | 100%        | 100%        | 52.080.728 | 100%        | 150.000.000 | 100%        | 150.000.000 | 100%        | 150.000.000 | 100%        | 150.000.000 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                | Sasaran : Dokumen Data Gender dan Anak                                                                                 | 2 Dok       | 2 Dok       | 52.080.728 | 2 Dok       | 150.000.000 | 2 Dok       | 150.000.000 | 2 Dok       | 150.000.000 | 2 Dok       | 150.000.000 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                             | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                  |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
|                                                                                                                             | Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                         |             |             |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>                                                                                                                          | <b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>227.895.572</b> | <b>100%</b> | <b>550.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>550.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>550.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>550.000.000</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>Indikator Kegiatan : Persentase (%) Peran Aktif Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>-</b>           | <b>100%</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>100.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>100.000.000</b> |                    |
| Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Sasaran ; Dokumen KLA                                                                                                                                                                                                                                      | -           | -           | -                  | 4 Lembaga   | 100.000.000        | 4 Lembaga   | 100.000.000        | 4 Lembaga   | 100.000.000        | 4 Lembaga   | 100.000.000        |                    |
|                                                                                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota        |             |             |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |                    |
|                                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>Indikator Kegiatan : Persentase (%) Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>227.895.572</b> | <b>100%</b> | <b>450.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>450.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>450.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>450.000.000</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  | Sasaran ; Dokumen KLA                                                                                                                         | 360 orang   | 360 orang   | 33.407.231         | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                         |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                                               | Indikator Hasil : Terpenuhi nya lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Sasaran ; Dokumen KLA                                                                                                                         | 360 orang   | 360 orang   | 33.407.231         | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                         |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                                               | Indikator Hasil : Terpenuhi nya lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak                     |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran : Anak-anak Kab. Sanggau                                                                                                              | 360 orang   | 360 orang   | 105.081.110        | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                                                               | Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Yang Dibina                               |             |             |                    | -           | -                  |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|                                                                                                                                                               | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan Yang Dibina                    |             |             |                    | -           |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |           |            |         |             |         |             |         |             |         |             |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--------------------|
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran : Anak -anak Kab. Sanggau                                                                                                                | 360 orang | 360 orang | 56.000.000 | -       | -           |         |             |         |             |         |             |  | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                 | Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Desa/Kelurahan Yang Dibina                                    |           |           |            |         |             |         |             |         |             |         |             |  |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Hasil : TerpenuhiJumlah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan,Desa/Kelurahan Yang Dibina                       |           |           |            |         |             |         |             |         |             |         |             |  |                    |
| Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota        | Sasaran : Anak -anak Kab. Sanggau                                                                                                                | -         | -         | -          | 50 Orng | 250.000.000 | 50 Orng | 250.000.000 | 50 Orng | 250.000.000 | 50 Orng | 250.000.000 |  | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                 | Indikator Keluaran : jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek       |           |           |            | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             |  |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Hasil : Terpenuhijumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek |           |           |            |         |             |         |             |         |             |         |             |  |                    |
| penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota    | Sasaran : Anak -anak Kab. Sanggau                                                                                                                | -         | -         | -          | 1 Dok   | 200.000.000 | 1 Dok   | 200.000.000 | 1 Dok   | 200.000.000 | 1 Dok   | 200.000.000 |  | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                 | Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                   |           |           |            | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             |  |                    |
|                                                                                                                 | Indikator Hasil : TerpenuhiJumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota             |           |           |            |         |             |         |             |         |             |         |             |  |                    |

|                                                                                                                                  |                                                                                                              |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--------------------|
| <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>                                                                                          | <b>Persentase Anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komperhensif</b>                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |   | <b>100%</b> |  | <b>100%</b> |  | <b>100%</b> |  | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                                  | <b>Indeks Peelindungan Khusus Anak (IPKA)</b>                                                                |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                      | Indikator Kegiatan :<br>Persentase (%) Dokumen Hasil kebijakan perlindungan khusus anak dalam 1 (satu) tahun | 100%        | 100%        | 62.821.980 | -           | - |             |  |             |  |             |  | DINSOSP3AKB        |
| Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Sasaran : Desa Layak Anak                                                                                    | 1 Dok       | 1 Dok       | 16.268.366 | -           | - |             |  |             |  |             |  | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                  | Indikator Keluaran :<br>Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota                       |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |
|                                                                                                                                  | Indikator Hasil :<br>Terpenuhinya Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota             |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |
| <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Indikator Kegiatan :Persentase (%) AMPK yang mendapatkan layanan dalam 1 (satu) tahun</b>                 | <b>100%</b> | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |   |             |  |             |  |             |  | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                              | Sasaran : Desa Layak Anak                                                                                    | 25 Orang    | 25 Orang    | 64.211.453 | -           | - |             |  |             |  |             |  | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                  | Indikator Keluaran :<br>Jumah AMPK yang mendapatkan layanan                                                  |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |
|                                                                                                                                  | Indikator Hasil :<br>Terpenuhinya AMPK yang mendaptkan layanan                                               |             |             |            |             |   |             |  |             |  |             |  |                    |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                  | Sasaran : Desa Layak Anak                                                                                                                                       | - | - | - | 25 orang | 50.000.000  | 25 orang | 50.000.000  | 25 orang | 50.000.000  | 25 orang | 50.000.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                     | Indikator Keluaran :Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota                                         |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|                                                                                                                                     | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota                             |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
| layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                        | Sasaran : Desa Layak Anak                                                                                                                                       | - | - | - | 25 orang | 200.000.000 | 25 orang | 200.000.000 | 25 orang | 200.000.000 | 25 orang | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                     | Indikator Keluaran :Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota             |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|                                                                                                                                     | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
| layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Sasaran : Desa Layak Anak                                                                                                                                       | - | - | - | 25 orang | 30.000.000  | 25 orang | 30.000.000  | 25 orang | 30.000.000  | 25 orang | 30.000.000  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                     | Indikator Keluaran :Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |
|                                                                                                                                     | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           |   |   |   |          |             |          |             |          |             |          |             |             |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |        |         |            |        |   |        |  |        |  |        |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|---|--------|--|--------|--|--------|--|-------------|
|                                                                                                                                                     | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                                                 | 1,38   | 1,36    |            | 1,34   |   |        |  |        |  |        |  | DINSOSP3AKB |
| Program Pengendalian Penduduk                                                                                                                       | Angka kelahiran Remaja Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)                                                                                                          | 42,70% | 42,55 % |            | 42,55% |   | 42,40% |  | 42,10% |  | 41,95% |  | DINSOSP3AKB |
| Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                              | 5,20%  | 5,20%   |            | 5,20%  |   | 5,60%  |  | 5,60%  |  | 5,60%  |  |             |
| Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota.                                                    | Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait                                                                                                                                                  | 1 Dok  | 1 Dok   | 16.149.672 | -      | - |        |  |        |  |        |  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                     | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.                                                               | 100%   | 100%    |            |        |   |        |  |        |  |        |  |             |
|                                                                                                                                                     | Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Koalisi Kependudukan yang Disusun                                                         |        |         |            |        |   |        |  |        |  |        |  |             |
| Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)         | Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait                                                                                                                                                  | 2 Dok  | 2 Dok   | 52.124.886 |        |   |        |  |        |  |        |  | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                     | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) | 100%   | 100%    | 100%       | -      | - |        |  |        |  |        |  |             |
|                                                                                                                                                     | Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen GDPK yang disusun                                                                                                                              |        |         |            | -      |   |        |  |        |  |        |  |             |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |             |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|
| Kerjasama Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal                                                                                                     | Sasaran : Sekolah                                                                                                                                                                                                       |             |             |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Keluaran : Jumlah Kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan                                                                                                                 | 23 Kegiatan | 23 Kegiatan | 14.357.772 | -                    | -          |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Hasil : Terpenuhinya Kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan                                                                                                              | 100%        | 100%        |            | 100%                 |            |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
| Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            | Sasaran : Sekolah                                                                                                                                                                                                       |             |             |            | 1 Dok                | 82.165.600 | 1 Dok                | 82.165.600 | 1 Dok                | 82.165.600 | 1 Dok                | 82.165.600 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                              |             |             |            | 100%                 | -          | 100%                 |            | 100%                 |            | 100%                 |            |                    |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                    |             |             |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
| Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Sasaran : Sekolah                                                                                                                                                                                                       |             |             |            | 23 Satuan Pendidikan | 12.345.000 | 23 Satuan Pendidikan | 12.345.000 | 23 Satuan Pendidikan | 12.345.000 | 23 Satuan Pendidikan | 12.345.000 | <b>DINSOSP3AKB</b> |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Keluaran : Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal           |             |             |            | -                    | -          |                      |            |                      |            |                      |            |                    |
|                                                                                                                                                                           | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal |             |             |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                    |

|                                                                                |                                                                                                                           |             |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota | Sasaran : Sekolah                                                                                                         |             |             |            | 2 Kab/Kota  | 12.345.000 | 2 Kab/Kota  | 12.345.000 | 2 Kab/Kota  | 12.345.000 | 2 Kab/Kota  | 12.345.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan           |             |             |            | -           | -          |             |            |             |            |             |            |             |
|                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan |             |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
| <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB</b>          | <b>100%</b> | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |            | <b>100%</b> |            |             |
| Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga             | Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes                                                                              | 2 Laporan   | 2 Laporan   | 83.275.000 | 2 Laporan   | 83.275.000 | 2 Laporan   | 83.275.000 | 2 Laporan   | 83.275.000 | 2 Laporan   | 83.275.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                    | 100%        | 100%        |            | 100%        |            | 100%        |            | 100%        |            | 100%        |            |             |
|                                                                                | Indikator Hasil : Terpenuhinya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                 |             |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Pencatatan dan Pengumpulan Keluarga                                                                                                        | Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes                                                                                                                                                                             | 1 Laporan | 1 Laporan | 101.400.000 | 1 Laporan | 112.000.000 | 1 Laporan | 101.400.000 | 1 Laporan | 101.400.000 | 1 Laporan | 101.400.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                            | Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                              | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Tersusunnya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                    |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                       | Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes                                                                                                                                                                             | 2 Dok     | 2 Dok     | 113.000.000 | 2 Dok     | 114.000.000 | 2 Dok     | 114.000.000 | 2 Dok     | 114.000.000 | 2 Dok     | 114.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                 | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhiya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                               |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kmapung KB untuk memperkuat Integritas Program Bnagga Kencana di Sektor laiin. | Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes                                                                                                                                                                             | 2 Unit    | 2 Unit    | 4.000.000   | -         |             |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk. | 100%      | 100%      |             | -         |             |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                                                            | Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang dibina                                                                                                                                              |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes                                                                                                                                                                                     | -            | -            | -                    | 2 Unit       | 6.000.000   | 2 Unit       |             | 2 Unit       |             | 2 Unit       |             |             |
|                                                                                                                                         | Indikator Keluaran :Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk          | -            | -            |                      | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             | 100%         |             |             |
|                                                                                                                                         | Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk |              |              |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |             |
| <b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>                                                                                        | <b>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (Mpcr)</b>                                                                                                                                                          | <b>66,80</b> | <b>67,30</b> |                      | <b>67,80</b> |             | <b>68,30</b> |             | <b>68,80</b> |             | <b>69,30</b> |             | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                         | <b>Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet need)</b>                                                                                                                                                             | <b>10,00</b> | <b>9,50</b>  |                      | <b>9,00</b>  |             | <b>8,50</b>  |             | <b>8,00</b>  |             | <b>8,00</b>  |             |             |
| <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>          | <b>Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49</b>                                                                                                                                                       | <b>74,96</b> | <b>74,96</b> | <b>1.227.248.758</b> | <b>74,96</b> |             | <b>74,96</b> |             | <b>74,96</b> |             | <b>74,96</b> |             | DINSOSP3AKB |
| Pengendalian Program KKBPK                                                                                                              | Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja                                                                                                                                                                      | -            | -            | -                    | 2 Lap        | 120.000.000 | 2 Lap        | 120.000.000 | 2 Lap        | 120.000.000 | 2 Lap        | 120.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                             | -            | -            |                      | 100%         |             |              |             |              |             |              |             |             |
|                                                                                                                                         | Indikator Hasil : Terpuhinya Laporan hasil pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                            |              |              |                      |              |             |              |             |              |             |              |             |             |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Pengelolaan Operasional dan Saran di Balai Penyuluh Bangsa Kencana                                                                                                    | Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja                                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan | 1 Laporan | 722.248.758 | 1 Laporan | 722.248.758 | 1 Laporan | 722.248.758 | 1 Laporan | 722.248.758 | 1 Laporan | 722.248.758 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                       | Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                        | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                       | Indikator Hasil : Terpenuhi Laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana).                                                                                         |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) | Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja                                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan | 1 Laporan | 195.000.000 | 1 Laporan | 227.460.000 | 1 Laporan | 227.460.000 | 1 Laporan | 227.460.000 | 1 Laporan | 227.460.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                       | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)        | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                       | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |               |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang. | Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja                                                                                                                                             | 1 Dokumen     | 1 Dokumen     | 150.000.000 | 1 Dokumen     | 155.000.000 | 1 Dokumen     | 155.000.000 | 1 Dokumen     | 155.000.000 | 1 Dokumen     | 155.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 100%          | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             |             |
|                                                                                                         | Indikator Hasil : Tingkat Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang    |               |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |             |
| Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Steakholder dan Mitra Kerja                  | Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja                                                                                                                                             | 45 Organisasi | 45 Organisasi | 160.000.000 | 45 Organisasi | 200.000.000 | 45 Organisasi | 200.000.000 | 45 Organisasi | 200.000.000 | 45 Organisasi | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                | 100%          | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             | 100%          |             |             |
|                                                                                                         | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja         |               |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |             |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b> | <b>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk</b>                                                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>521.250.000</b> | <b>100%</b> | <b>521.250.000</b> | <b>100%</b> | <b>521.250.000</b> | <b>100%</b> | <b>521.250.000</b> | <b>100%</b> | <b>521.250.000</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)            | Sasaran : Kader PPKBD dan SUB PPKBD                                                                                                                                                                              | 15 Orang    | 15 Orang    | 461.250.000        | 15 Orang    | 461.250.000        | 15 Orang    | 461.250.000        | 15 Orang    | 461.250.000        | 15 Orang    | 461.250.000        | DINSOSP3AKB        |
|                                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                           | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |                    |
|                                                                        | Indikator Hasil : Terpenuhiya Kader yang mengikuti penggerakan kader Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                          |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |
| Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)            | Sasaran : Kader PPKBD dan SUB PPKBD                                                                                                                                                                              | 1 Lap       | 1 Lap       | 60.000.000         | 1 Lap       | 60.000.000         | 1 Lap       | 60.000.000         | 1 Lap       | 60.000.000         | 1 Lap       | 60.000.000         | DINSOSP3AKB        |
|                                                                        | Indikator Keluaran : Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)          | 100%        | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    | 100%        |                    |                    |
|                                                                        | Indikator Hasil : Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |                    |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                | <b>Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b>            | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     | <b>394.041.626</b> | <b>100%</b>     | <b>575.410.000</b> | <b>100%</b>     | <b>574.910.000</b> | <b>100%</b>     | <b>574.910.000</b> | <b>100%</b>     | <b>574.910.000</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. | Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau                                                                                               | 1 Laporan       | 1 Laporan       | 34.200.000         | 1 Laporan       | 52.500.000         | 1 Laporan       | 52.000.000         | 1 Laporan       | 52.000.000         | 1 Laporan       | 52.000.000         | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  | 100%            | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    |                    |
|                                                                                                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                    |
| Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (DAU+DAK)                                                                       | Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau                                                                                               | 12.709 Akseptor | 12.709 Akseptor | 322.841.626        | 12.709 Akseptor | 446.710.000        | 12.709 Akseptor | 446.710.000        | 12.709 Akseptor | 446.710.000        | 12.709 Akseptor | 446.710.000        | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                                    | Indikator Keluaran :Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                          | 100%            | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    | 100%            |                    |                    |
|                                                                                                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                  |                 |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                    |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |              |              |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan                                                       | Sasaran : 94,138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau                                                                                                   | 1 Laporan    | 1 Laporan    | 37.000.000            | 1 Laporan   | 76.200.000            | 1 Laporan   | 76.200.000            | 1 Laporan   | 76.200.000            | 1 Laporan   | 76.200.000            | DINSOSP3AKB        |
|                                                                                                                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                         | 100%         | 100%         |                       | 100%        |                       | 100%        |                       | 100%        |                       | 100%        |                       |                    |
|                                                                                                                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                  |              |              |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |                    |
| <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> | <b>Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB</b>                                                                                         | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>148.084.712,20</b> | <b>100%</b> | <b>372.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>372.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>372.000.000,00</b> | <b>100%</b> | <b>372.000.000,00</b> | <b>DINSOSP3AKB</b> |
| Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 | Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)                                                                                                         | 3 Organisasi | 3 Organisasi | 42.484.712            | -           | -                     | -           | -                     | -           | -                     | -           | -                     |                    |
|                                                                                                                                                                    | Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100%         | 100%         |                       | -           |                       | -           |                       | -           | -                     | -           |                       |                    |
|                                                                                                                                                                    | Indikator Hasil : Terpenuhi Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB |              |              |                       |             |                       |             |                       |             |                       |             |                       |                    |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |             |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)                                                                                                             | 8 Unit      | 8 Unit      | 44.000.000    | -           | -             | -           | -             | -           | -             | -           | -             | DINSOSP3AKB |
|                                                                                            | Indikator Keluaran : Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                | 100%        | 100%        |               | -           |               |             |               |             |               |             |               | DINSOSP3AKB |
|                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                         |             |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |
| Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas         | Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)                                                                                                             | 169 Kampung | 169 Kampung | 61.600.000    | 169 Kampung | 372.000.000   | 169 Kampung | 372.000.000   | 169 Kampung | 372.000.000   | 169 Kampung | 372.000.000   | DINSOSP3AKB |
|                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)        | 100%        | 100%        |               | 100%        |               | 100%        |               | 100%        |               | 100%        |               | DINSOSP3AKB |
|                                                                                            | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) |             |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |
| Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                               | Persentase Keluarga Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga                                                                                                                             | 71,04 %     | 71,04 %     | 2.718.433.204 | 71,04 %     | 3.028.600.000 | 71,04 %     | 3.028.600.000 | 71,04 %     | 3.028.600.000 | 71,04 %     | 3.028.600.000 | DINSOSP3AKB |
| Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga    | Indikator Kegiatan : Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan                                                                                         | 100%        | 100%        | 137.833.204   | 100%        | 448.000.000   | 100%        | 448.000.000   | 100%        | 448.000.000   | 100%        | 448.000.000   | DINSOSP3AKB |
| Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)           | Sasaran : Kelompok Tribina                                                                                                                                                                     | -           | -           | -             | 1 Laporan   | 48.000.000    | 1 Laporan   | 48.000.000    | 1 Laporan   | 48.000.000    | 1 Laporan   | 48.000.000    | DINSOSP3AKB |
|                                                                                            | Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)                                                                     | -           | -           |               | 100%        |               | 100%        |               | 100%        |               | 100%        |               |             |
|                                                                                            | Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)                                                            |             |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)) | Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina                                                                                                                                                                         | 1 Laporan | 1 Laporan | 121.057.312 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | 1 Laporan | 150.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                         | Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)               | 100%      | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             | 100%      |             |             |
|                                                                                                                                                                         | Indikator Hasil : Cakupan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)         |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
| Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi                                           | Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina                                                                                                                                                                         | -         | -         | -           | 20 Unit   | 200.000.000 | 20 Unit   | 200.000.000 | 20 Unit   | 200.000.000 | 20 Unit   | 200.000.000 | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                         | Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia        |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |
|                                                                                                                                                                         | Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga)> | Sasaran : Remaja dan Guru BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Kelompok    | 5 Kelompok    | 16.775.892           | 5 Kelompok    | 50.000.000           | 5 Kelompok    | 50.000.000           | 5 Kelompok    | 50.000.000           | 5 Kelompok    | 50.000.000           | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Keluaran :Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk             |               |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk |               |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |             |
| <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                              | <b>Indikator Kegiatan : Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri</b>                                                                                                                                                                                        | <b>53,33%</b> | <b>53,33%</b> | <b>2.580.600.000</b> | <b>53,33%</b> | <b>2.580.600.000</b> | <b>53,33%</b> | <b>2.580.600.000</b> | <b>53,33%</b> | <b>2.580.600.000</b> | <b>53,33%</b> | <b>2.580.600.000</b> | DINSOSP3AKB |
| Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita)                                                                                                                                                | Sasaran : Kader Tribina                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391 Lap       | 391 Lap       | 2.580.600.000        | 391 Lap       | 2.580.600.000        | 391 Lap       | 2.580.600.000        | 391 Lap       | 2.580.600.000        | 391 Lap       | 2.580.600.000        | DINSOSP3AKB |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan                                                                                                                                             |               |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Hasil : Tingkat Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/ Balita) yang mendapat pendampingan                                                                                                                                        |               |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |             |

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO. | PROGRAM PRIORITAS                                      | OUTCOME                                                                     | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       | KET               |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                         | (5)               |
| 1.  | Pemberdayaan Sosial                                    | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial                                            | <b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                      | <b>KEMISKINAN</b> |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial                                                              |                   |
| 2.  | Penanganan Warga negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan | <b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>                               |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |                   |
| 3.  | Rehabilitasi Sosial                                    | Meningkatnya Rehabilitasi Sosial                                            | <b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.</b>                         | <b>SPM</b>        |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                          |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                                                             |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                                          |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                                       |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                                       |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat                  |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                      |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                                           |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                                  |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                                       |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                                      |                   |
|     |                                                        |                                                                             | Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota     |                   |

|    |                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                   |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4. | Perlindungan Jaminan Sosial dan                   | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>                                                                                                    | <b>KEMISKINAN</b> |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                       |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar                                                                                                            |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                                                                            |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | <b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                         |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                     |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                       |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                   |
| 5. | Penanganan Bencana                                | Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana                                                 | <b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                                                                   | <b>SPM</b>        |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                                                                     |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                     |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                 |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                         |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                                |                   |
| 6. | Pengelolaan Taman Makam Pahlwan                   | Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlwan                                                    | <b>Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                                                                           |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                              |                   |
| 7. | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | <b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>APE</b>        |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | <b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>          |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                      |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                   |
|    |                                                   |                                                                                                 | Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota |                   |

|     |                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.  | Perlindungan Perempuan                  | Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                                               | <b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                             |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                      |            |
| 9.  | Peningkatan Kualitas Keluarga           | Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>KLA</b> |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota                                                    |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                             |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                 |            |
| 10. | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak                                                                         | <b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                          |            |
|     |                                         |                                                                                                                       | Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                              |            |

|     |                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11. | Pemenuhan Hak Anak       | Terjaminnya Pemenuhan Hak semua anak secara Komprehensif                                                                                  | <b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                      | <b>KLA</b>      |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                          |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |                 |
| 12. | Perlindungan Khusus Anak | Meningkatnya pencegahan dan Penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                       | <b>KLA</b>      |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                              |                 |
| 13  | Pengendalian Penduduk    | Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk                                                                                                 | <b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas</b>                             | <b>STUNTING</b> |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | <b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                                        |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                  |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                      |                 |
|     |                          |                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                                   |                 |

|     |                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14. | Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB) | <b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                                          | <b>STUNTING</b> |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                          |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                               |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)              |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                              |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                             |                 |
|     |                                   |                                                                                              | <b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                                                                  |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                               |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                 |
|     |                                   |                                                                                              | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                     |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                            |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                           |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                            |                 |
|     |                                   |                                                                                              | <b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                      |                 |
|     |                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                  |                 |

|     |                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15. | Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS) | <b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                                                                                               | <b>STUNTING</b> |
|     |                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                                                                                         |                 |
|     |                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                                                                                   |                 |
|     |                                                      |                                                                                               | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                                                                                                       |                 |
|     |                                                      |                                                                                               | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |                 |
|     |                                                      |                                                                                               | <b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                    |                 |
|     |                                                      |                                                                                               | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                                                                                                  |                 |

Untuk penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau melalui indikator kinerja utama dan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berlaku dari tahun 2025 hingga 2029. Indikator yang disajikan merupakan indikator yg terseleksi sesuai dengan urusan bidang masing-masing. Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029, serta sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

#### Rumusan Indikator

| No                                                  | BIDANG<br>URUSAN/INDIKATOR                                                                                         | RUMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Sosial                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.1                                                 | Persentase PPKS                                                                                                    | $\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tetangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$                                                                                                                                                                                                       |
| 6.2                                                 | Persentase PPKS yang Mandiri                                                                                       | $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3                                                 | Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial                               | $\frac{\text{Jumlah Panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} \times 100\%}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}$                                                             |
| 6.4                                                 | Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni                                                                        | $\frac{\text{Jumlah RTLH yang direhabilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah RTLH selama satu tahun}}$                                                                                                                                                                                                |
| 6.5                                                 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | $\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}}$ |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                                                                                                                               | $IPG = \frac{1}{3} X (ede 1) + X(ede 2) + 1 \text{ inc-dis}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                                                                                                                              | $IDG = \frac{1}{3} [(1por + 1Dm + 1 Inc - -dis)]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.3.  | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                                                                                          | $\frac{\text{Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.  | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                                                                                        | $\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah} \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja perempuan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5.  | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                                                                                                 | $\frac{\text{Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.6.  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                       | $\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga swasta} \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja perempuan}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.7.  | Rasio KDRT                                                                                                                                                                    | $\frac{\text{Jumlah KDRT} \times 100\%}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.8.  | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                           | $\frac{\text{APM-SD Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.9.  | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                                                          | $\frac{\text{APM-SMP Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.10. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                                                                                          | $\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun} \times 100\%}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18}}$                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.11. | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                                                                                                                             | $\frac{\text{Jumlah anak perempuan tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn} \times 100\%}{\text{Jumlah anak laki-laki tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn}}$                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.12. | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                                                                                                 | $\frac{\text{AMH 15-24 Perempuan}}{\text{AMH 15-24 laki-laki}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.13. | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian                                                                                                           | $\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuandisektor non pertanian} \times 100\%}{\text{Banyaknya pekerja upahan disektor non pertanian}}$                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.14. | Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)                                                                                                                                      | Predikat Kabupaten Layak Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.16. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | $\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu} \times 100\%}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk keunit pelayanan terpadu}}$                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.17. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | $\frac{\text{Jumlah korban Ktp/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas maupun tatalaksana Ktp/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}$ |
| 2.18. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi                                                                             | $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos} \times 100}{\text{Jumlah korban kekerasan yang}}$                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.                                                                                | membutuhkan rehabsos%                                                                                                                                                                                                        |
| 2.19.                                        | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak             | Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan <u>terhadap perempuan dan anak</u> x 100%<br>Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan |
| 2.20.                                        | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                  | <u>Jumlah korban mendapat pelayanan bantuan hukum</u> x 100%<br>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum                                                                                                                 |
| 2.21.                                        | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                 | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan <u>pelayanan pemulangan</u> x 100%<br>Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT                                                            |
| 2.22.                                        | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                         | Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali <u>ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya</u> x 100%<br>jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial                                  |
| Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.1                                          | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                           | $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$                                                                                                                                                                                              |
| 8.2                                          | Total Fertility Rate                                                                                                                                | TFR = Angka Kelahiran total<br>ASFR = Angka kelahiran menurut kelompok umur                                                                                                                                                  |
| 8.3                                          | Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB                                           | <u>Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB</u> x 100%<br>Jumlah semua perangkat daerah                                                                                                                      |
| 8.4                                          | Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk                                      | Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan <u>Induk Pengendalian Penduduk</u> x 100%<br>Jumlah semua perangkat daerah                                                                                    |
| 8.5                                          | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                       | Jumlah perda atau perkara tentang pengendalian penduduk                                                                                                                                                                      |
| 8.6                                          | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | Jumlah Sektor                                                                                                                                                                                                                |
| 8.7                                          | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                 | Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan                                                                                                                                                                                     |
| 8.8                                          | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                                  | <u>Jumlah anak</u> x 100%<br>Jumlah keluarga                                                                                                                                                                                 |
| 8.9                                          | Ratio Akseptor                                                                                                                                      | <u>Jumlah Akseptor KB</u> x 100%<br>Jumlah pasangan usia subur                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.10 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif} \times 100\%}{\text{Jumlah pasangan usia subur}}$                                                                                      |
| 8.11 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                                                 | $\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19} \times 100\%}{\text{Jumlah kelompok perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}}$ |
| 8.12 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                                                                                | $\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri diumur kurang 20 thn} \times 100\%}{\text{Jumlah pasangan usia subur}}$                                                 |
| 8.13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                      | $\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani} \times 100\%}{\text{Jumlah pasangan usia subur}}$                                                          |
| 8.14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                         | $\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP} \times 100\%}{\text{Jumlah Akseptor KB}}$                                                                             |
| 8.15 | Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                                         | $\frac{\text{Jumlah PUS yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi} \times 100\%}{\text{Jumlah Akseptor KB}}$                                                                   |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}}$                                                                     |
| 8.17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}}$                                                                     |
| 8.18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                               | $\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB} \times 100\%}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}}$                                                                     |
| 8.19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                                   | $\frac{\text{Jumlah PPKS} \times 100\%}{\text{Jumlah Kecamatan}}$                                                                                                            |
| 8.20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                             | $\frac{\text{Jumlah PIKR/M} \times 100\%}{\text{Jumlah Kecamatan}}$                                                                                                          |
| 8.21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk                    | $\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan} \times 100\%}{\text{Jumlah PKB/PLKB}}$                                                                                  |
| 8.22 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            | $\frac{\text{Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa/kelurahan}}$                                                                           |
| 8.23 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              | $\frac{\text{Jumlah alkon premix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alkon} \times 100\%}{\text{Perkiraan permintaan masyarakat}}$                                |
| 8.24 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | $\frac{\text{Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS} \times 100\%}{\text{Jumlah faskes dan jejaring}}$                                                      |
| 8.25 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 | $\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}}$                                         |
| 8.27 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga                                                                                                     | $\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8}}$                                                                                         |

|      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | melalui 8 fungsi keluarga                                                                                                   | $\frac{\text{fungsi keluarga} \times 100\%}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}}$                                                                                                                        |
| 8.28 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | $\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang} \times 100\%}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}}$ |
| 8.29 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes               | $\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB} \times 100\%}{\text{Jumlah APBD dan APBDes}}$                                                                                                        |

(Sumber : Permendagri 86 tahun 2017)

Dari rumusan indikator di atas sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka didapatlah hasil indikator guna mencapai target Rencana Strategis Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025--2029.

Untuk pencapaian target Rencana Stratetgis tersebut, maka dibagi menjadi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pencapaian target indikator tersebut telah terakomodir pada program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana selama tahun 2025-2029, jika pada tahun berjalan ternyata program dan kegiatan tersebut tidak mampu mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengatur strategi sehingga dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2025-2029.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama DINSOSP3AKB**

| NO                                                  | INDIKATOR                                    | SATUAN | TARGET TAHUN |            |              |              |           |           | KET       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                     |                                              |        | 2025         | 2026       | 2027         | 2028         | 2029      | 2030      |           |
| (1)                                                 | (2)                                          | (3)    | (4)          | (5)        | (6)          | (7)          | (8)       | (9)       | (10)      |
| <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>               |                                              |        |              |            |              |              |           |           |           |
| 1.                                                  | Nilai AKIP DINSOSP3AKB                       |        | 69,70        | 70,00      | 70,30        | 70,50        | 71,00     | 71,50     | 71,80     |
| <b>Sosial</b>                                       |                                              |        |              |            |              |              |           |           |           |
| 2.                                                  | Persentase PPKS yang mandiri                 |        | 30,49        | 30,55      | 31,00%       | 31,50%       | 32,00%    | 32,50%    | 32,50%    |
| <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |                                              |        |              |            |              |              |           |           |           |
| 3.                                                  | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan |        | 87,44        | 89,14      | 90,93        | 92,74        | 94,6      | 94,49     | 94,49     |
| 4.                                                  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)             |        | 74,00        | 74,00      | 74,50        | 75,00        | 75,50     | 76,00     | 76,50     |
| 5.                                                  | Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)    |        | 700 (Madya)  | 701(Madya) | 800 (Nindya) | 801 (Nindya) | 900 (KLA) | 901 (KLA) | 901 (KLA) |
| <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> |                                              |        |              |            |              |              |           |           |           |
| 6.                                                  | Total Fertility Rate                         |        | 2,21         | 2,18       | 2,16         | 2,14         | 2,12      | 2,10      | 2,10      |

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci DINSOSP3AKB**

| NO                                                  | INDIKATOR                                                                                                                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KET    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                     |                                                                                                                                                                               |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |        |
| (1)                                                 | (2)                                                                                                                                                                           | (3)    | (4)          | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   |
| <b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>               |                                                                                                                                                                               |        |              |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                   | Persentase Penduduk Miskin                                                                                                                                                    |        | 4,17 %       | 3,67 % | 3,17 % | 2,67 % | 2,17 % | 1,67 % | 1,67 % |
| 2                                                   | Nilai AKIP DINSOSP3AKB                                                                                                                                                        |        | 69,70        | 70,00  | 70,30  | 70,50  | 71,00  | 71,50  | 71,80  |
| 3                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                    |        | 90,95        | 91,00  | 91,50  | 92,00  | 92,50  | 93,00  | 94,00  |
| <b>Sosial</b>                                       |                                                                                                                                                                               |        |              |        |        |        |        |        |        |
| 4                                                   | Persentase PPKS yang di fasilitasi                                                                                                                                            |        | 98,90        | 98,92  | 98,94  | 98,96  | 98,96  | 99,00  | 99,00  |
| 5                                                   | Persentase PPKS yang tertangani                                                                                                                                               |        | 98,90        | 98,92  | 98,94  | 98,96  | 98,96  | 99,00  | 99,00  |
| 6                                                   | Persentase Bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat                                                                                                                   |        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 7                                                   | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan                                                                                                            |        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |                                                                                                                                                                               |        |              |        |        |        |        |        |        |
| 8                                                   | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                                                                                        |        | 0,32         | 0,34   | 0,36   | 0,38   | 0,4    | 0,42   | 0,44   |
| 9                                                   | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                                                                                                 |        | 10           | 10,50  | 11,02  | 11,57  | 12,15  | 12,75  | 13,38  |
| 10                                                  | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                       |        | 54,67        | 56,31  | 67,99  | 59,73  | 61,52  | 63,36  | 65,26  |
| 11                                                  | Rasio KDRT                                                                                                                                                                    |        | 0,64         | 0,11   | 0,057  | 0,057  | 0,57   | 0,57   | 0,57   |
| 12                                                  | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur                                                                                                                                   |        |              |        |        |        |        |        |        |
| 13                                                  | Partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                                                                                          |        | 87,44        | 89,14  | 90,93  | 92,74  | 94,6   | 94,49  | 94,49  |
| 14                                                  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       |        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 15                                                  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit |        | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

|                                                     |                                                                                                                                                                        |  |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16                                                  | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 17                                                  | Cakupan penegakan hukum dari tingkat pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 18                                                  | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                     |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 19                                                  | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                    |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 20                                                  | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                            |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 21                                                  | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                    |  | 98,52 | 98,54 | 98,56 | 98,58 | 98,60 | 98,62 | 98,64 |
| 22                                                  | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                                                   |  | 71,29 | 71,31 | 71,33 | 71,35 | 71,37 | 71,39 | 72,00 |
| 23                                                  | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                                                                                   |  | 37,43 | 37,45 | 37,47 | 37,49 | 37,51 | 37,53 | 37,55 |
| 24                                                  | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                                                                                                                      |  |       |       |       |       |       |       |       |
| 25                                                  | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                                                                                          |  | 99,82 | 99,82 | 99,83 | 99,84 | 99,85 | 99,86 | 99,86 |
| 26                                                  | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian                                                                                                    |  |       |       |       |       |       |       |       |
| 27                                                  | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                                             |  | 74    | 74,5  | 75    | 75,5  | 76    | 76,5  | 76,5  |
| 28                                                  | Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                                     |  | 700   | 701   | 800   | 801   | 900   | 901   | 901   |
| <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b> |                                                                                                                                                                        |  |       |       |       |       |       |       |       |
| 29                                                  | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                                                                                              |  | 1,70  | 1,60  | 1,50  | 1,40  | 1,20  | 1,00  | 1,00  |
| 30                                                  | Total Fertility Rate                                                                                                                                                   |  | 2,21  | 2,18  | 2,16  | 2,14  | 2,12  | 2,10  | 2,10  |
| 31                                                  | Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB                                                              |  | 35 %  | 55 %  | 65 %  | 75 %  | 85 %  | 95 %  | 95 %  |
| 32                                                  | Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk                                                         |  | 20 %  | 35 %  | 50 %  | 60 %  | 70 %  | 80 %  | 80 %  |
| 33                                                  | Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                                          |  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 6     |

|      |                                                                                                                                                  |  |         |         |         |         |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 34   | Jumlah sektor yang menepati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 35   | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                              |  | 25      | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 75      |
| 36   | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                               |  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 37   | Ratio Akseptor                                                                                                                                   |  | 67,00 % | 68,00 % | 69,00 % | 70,00 % | 71,00 % | 72,00 % | 72,00 % |
| 38   | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                |  | 66,80 % | 65,00%  | 64,00%  | 63,00%  | 62,00 % | 60,00%  | 60,00%  |
| 39   | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                                  |  | 42,70 % | 37,70%  | 32,70%  | 27,70%  | 22,70%  | 18,00%  | 18,00%  |
| 40   | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istringa dibawah 20 tahun                                                                                 |  | 0,49%   | 0,39%   | 0,29%   | 0,19%   | 0,10%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 8.13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                       |  | 10,00%  | 9,50%   | 9,00%   | 8,50%   | 8,00%   | 7,40%   | 7,40%   |
| 8.14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          |  | 6,83%   | 12,00%  | 17,00%  | 23,00%  | 25,00%  | 28,40%  | 28,40%  |
| 8.15 | Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                          |  | 40,90%  | 45,00%  | 45,80%  | 48,00%  | 55,00%  | 60,00%  | 60,00%  |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                |  | 77,55%  | 82,00%  | 85,00%  | 88,00%  | 91,00%  | 95,00%  | 95,00%  |
| 8.17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                |  | 60,00%  | 62,00%  | 65,00%  | 68,00%  | 70,00%  | 73,00%  | 73,00%  |
| 8.18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                |  | 15,17%  | 20,00%  | 25,00%  | 30,00%  | 35,00%  | 40,00%  | 40,00%  |
| 8.19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                    |  | 3       | 5       | 8       | 10      | 13      | 15      | 15      |
| 8.20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                              |  | 2.904   | 6.107   | 9.771   | 12.214  | 14.657  | 18.322  | 18.322  |
| 8.21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk     |  | 16      | 30      | 45      | 55      | 65      | 80      | 80      |

|      |                                                                                                                                                  |  |         |         |         |         |         |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 34   | Jumlah sektor yang menepati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 35   | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                              |  | 25      | 35      | 45      | 55      | 65      | 75      | 75      |
| 36   | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                               |  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 37   | Ratio Akseptor                                                                                                                                   |  | 67,00 % | 68,00 % | 69,00 % | 70,00 % | 71,00 % | 72,00 % | 72,00 % |
| 38   | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49                                                                                |  | 66,80 % | 65,00%  | 64,00%  | 63,00%  | 62,00 % | 60,00%  | 60,00%  |
| 39   | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)                                                  |  | 42,70 % | 37,70%  | 32,70%  | 27,70%  | 22,70%  | 18,00%  | 18,00%  |
| 40   | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                                                                 |  | 0,49%   | 0,39%   | 0,29%   | 0,19%   | 0,10%   | 0,00%   | 0,00%   |
| 8.13 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                       |  | 10,00%  | 9,50%   | 9,00%   | 8,50%   | 8,00%   | 7,40%   | 7,40%   |
| 8.14 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                          |  | 6,83%   | 12,00%  | 17,00%  | 23,00%  | 25,00%  | 28,40%  | 28,40%  |
| 8.15 | Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                          |  | 40,90%  | 45,00%  | 45,80%  | 48,00%  | 55,00%  | 60,00%  | 60,00%  |
| 8.16 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                |  | 77,55%  | 82,00%  | 85,00%  | 88,00%  | 91,00%  | 95,00%  | 95,00%  |
| 8.17 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                |  | 60,00%  | 62,00%  | 65,00%  | 68,00%  | 70,00%  | 73,00%  | 73,00%  |
| 8.18 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                |  | 15,17%  | 20,00%  | 25,00%  | 30,00%  | 35,00%  | 40,00%  | 40,00%  |
| 8.19 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan                                                                                    |  | 3       | 5       | 8       | 10      | 13      | 15      | 15      |
| 8.20 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                              |  | 2.904   | 6.107   | 9.771   | 12.214  | 14.657  | 18.322  | 18.322  |
| 8.21 | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk     |  | 16      | 30      | 45      | 55      | 65      | 80      | 80      |

|      |                                                                                                                                                                 |  |         |         |         |         |         |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8.22 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan                                                                                            |  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
| 8.23 | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              |  | 60,00%  | 62,00%  | 63,00%  | 64,00%  | 66,00%  | 68,00%  | 68,00%  |
| 8.24 | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan |  | 80,00 % | 82,00 % | 85,00 % | 90,00 % | 95,00 % | 100 %   | 100 %   |
| 8.25 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 |  | 9,47 %  | 18,93 % | 28,40%  | 37,87 % | 47,34 % | 56,80%  | 56,80%  |
| 8.26 | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 8.27 | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                                           |  | 60,00 % | 65,00 % | 70,00 % | 75,00 % | 80,00 % | 85,00 % | 85,00 % |
| 8.28 | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak                                     |  | 38,12%  | 40,00%  | 45,00 % | 50,00 % | 55,00 % | 60,00%  | 60,00%  |
| 8.29 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes                                                 |  | 6,30 %  | 10,00 % | 15,00 % | 20,00 % | 25,00%  | 30,00 % | 30,00 % |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2029.

#### **5. 2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 – 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.